



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II**

**JUDUL  
INTEGRASI DAN OPTIMALISASI LAYANAN DATA PENATAAN  
RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA MELALUI  
SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG KAWASAN  
PERBATASAN (SI-PRKP)**

**Disusun oleh:**

**Nama : Muhammad Farid, S.STP., M.Si**  
**NIP : 19801025 199912 1 001**  
**Jabatan : Asisten Deputi Penataan Ruang  
Kawasan Perbatasan**  
**Instansi : Badan Nasional Pengelola  
Perbatasan**  
**Kelas/Kelompok : A/1**  
**Nomor Daftar Hadir : 34**  
**Angkatan : 28**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN**

JUDUL : INTEGRASI DAN OPTIMALISASI LAYANAN  
DATA PENATAAN RUANG KAWASAN  
PERBATASAN NEGARA MELALUI SISTEM  
INFORMASI PENATAAN RUANG KAWASAN  
PERBATASAN (SI-PRKP)

NAMA : Muhammad Farid, S.STP., M.Si  
NIP : 19801025 199912 1 001  
PANGKAT/GOLONGAN : Pembina Tk.I (IV/b)  
INSTANSI : Badan Nasional Pengelola Perbatasan  
JABATAN :Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan  
Perbatasan  
KELAS/KELOMPOK : A/1  
NOMOR DAFTAR HADIR : 34

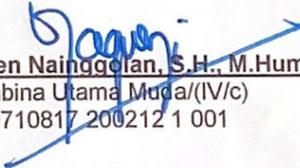
Disetujui diseminarkan pada Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan  
Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII pada tanggal  
Desember 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian  
Dalam Negeri.

Jakarta, Desember 2022

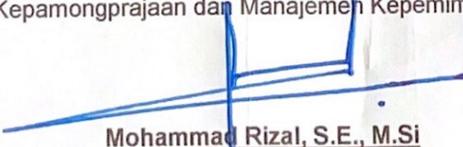
**Coach**

**Mentor**

  
Drs. Machmudan, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
19710305 199202 1 002

  
Dr. Gutmen Nainggolan, S.H., M.Hum  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
19710817 200212 1 001

Mengetahui:  
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi  
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan

  
Mohammad Rizal, S.E., M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19640817199303100

**BERITA ACARA  
SEMINAR PROYEK PERUBAHAN**

Pada hari : Rabu  
Tanggal : 07 Desember 2022  
Pukul : 08.00 s.d. Selesai  
Tempat : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kementerian Dalam Negeri

Telah diseminarkan Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

Judul : **INTEGRASI DAN OPTIMALISASI LAYANAN DATA PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA MELALUI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN (SI-PRKP)**

Disusun Oleh : Muhammad Farid, S.STP., M.Si  
Jabatan : Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

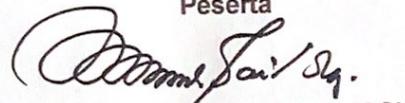
Kelas/Kelompok : A/1  
Nomor Daftar Hadir : 34

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, Mentor, dan Coach.

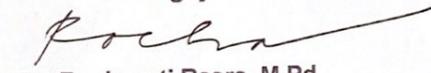
**Coach**

  
**Drs. Machmudan, M.Si**  
Pembina Utama Muda/(IV/c)  
19710305 199202 1 002

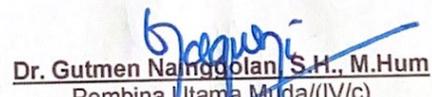
**Peserta**

  
**Muhammad Farid, S.STP., M.Si**  
Pembina Tk.I/(IV/b)  
19801025 199912 1 001

**Penguji**

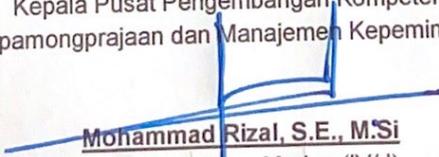
  
**Dr. Rochayati Basra, M.Pd**  
Pembina Utama Madya/(IV/d)  
19671031 200112 2 001

**Mentor**

  
**Dr. Gutmen Nainggolan, S.H., M.Hum**  
Pembina Utama Muda/(IV/c)  
19710817 200212 1 001

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi  
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan

  
**Mohammad Rizal, S.E., M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196408171993031001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas Perkenan Rahmat dan KaruniaNya akhirnya Proyek Perubahan yang akan dilaksanakan dengan mengambil topik/judul "Integrasi dan Optimalisasi Layanan Data Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Melalui Sistem Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (SI-PRKP)" akhirnya dapat kami selesaikan tepat waktu.

Topik/ Judul ini diangkat karena sangat relevan dengan kondisi yang ada di Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk merespon dinamika tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga.

Di era millineal yang sedang berlangsung saat ini, tehnologi informasi dan komunikasi menjadi suatu kebutuhan untuk menghadapi tantangan sebuah organisasi untuk dapat *survive*. Organisasi Publik dituntut untuk menyesuaikan diri dengan jalan melakukan perubahan agar organisasi berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel.

Salah satu inovasi dalam perubahan organisai adalah dengan Pembangunan Sistem Informasi Penataan Ruang kawasan Perbatasan (SI-PRKP) yang terintegrasi dan optimal. Dengan perubahan tersebut, prinsip efektif, efisien dan akuntabel akan terwujud.

Dalam upaya melakukan perubahan yang tertuang di Laporan Proyek Perubahan ini, Penyusun dengan rendah hati dan setulus-tulusnya mengucapkan terima kasih kepada ; Bapak Ir. Restuardy Daud, M.Sc selaku Sekretaris BNPP; Bapak Dr. Gutmen Naninggolan, S.H., M.Hum, selaku Mentor , Bapak Drs. Machmudan, M.Si. selaku *Coach* , Para pegawai Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dan Rekan-rekan Peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2022 yang telah banyak membantu melalui diskusi dan seminar kelompok untuk kesempurnaan laporan proyek perubahan ini. Kepada para pembaca, penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan tulisan dan pelaksanaan proyek perubahan dimasa yang akan datang. Semoga Allah Yang Maha Esa memberkati segala usaha yang telah kami lakukan.

Jakarta, Desember 2022



**Muhammad Farid, S.STP., M.Si**

Pembina Tk.I/(IV/b)  
19801025 199912 1 001

# DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>BERITA ACARA</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Deskripsi Proyek Perubahan</b> .....	1
<b>1.2 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.3 Tujuan</b> .....	10
<b>1.4 Manfaat</b> .....	11
<b>BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN</b> .....	12
<b>2.1 Output dan Outcome Proyek Perubahan</b> .....	12
2.1.1 Output.....	12
2.1.2 Outcome.....	12
<b>2.2 Tahapan Perubahan Rencana Strategis</b> .....	12
<b>2.3 Tata Kelola Proyek</b> .....	16
<b>2.4 Rencana Strategis Marketing Proyek Perubahan</b> .....	18
2.4.1 Identifikasi Stakeholder .....	18
2.4.2 Strategi Marketing.....	21
<b>BAB III IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN</b> .....	22
<b>3.1 Pengalaman Memimpin Perubahan</b> .....	22
3.1.1 Rapat Koordinasi Internal .....	22
3.1.2 Penyusunan Draft, Finalisasi serta Penandatanganan dan Penerbitan SK TIM.....	24
3.1.3 Rencana Pembuatan SI PRKP.....	25
3.1.4 Rapat Koordinasi Internal SI PRKP.....	26
3.1.5 Rapat Tindak Lanjut Koordinasi Internal SI PRKP .....	28
<b>3.2 Implementasi Strategi Marketing Proyek Perubahan</b> .....	29
3.2.1 Implementasi Strategi marketing .....	30

3.2.2 Peta dan Dukungan Stakeholders.....	31
3.2.3 Strategi Marketing.....	33
<b>3.3 Strategi Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran .....</b>	<b>35</b>
<b>3.4 Hasil Capaian Proyek Perubahan .....</b>	<b>37</b>
<b>3.5 Keberlanjutan Proyek Perubahan.....</b>	<b>44</b>
3.5.1 Dukungan Mentor untuk Keberlanjutan Proyek Perubahan.....	44
3.5.2 Rencana Implementasi Jangka Menengah dan Panjang.....	45
<b>3.6 Lesson Learnt.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
<b>4.1 Simpulan .....</b>	<b>48</b>
<b>4.2 Rekomendasi .....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sebaran Peraturan presiden Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara .....	5
Gambar 2. Alur Pikir Penyelesaian Isu Strategis pada Asdep PRKP .....	8
Gambar 3. Tata Kelola Proyek Perubahan .....	16
Gambar 4. Peran Stakeholder .....	19
Gambar 5 Kegiatan Rapat Koordinasi Internal Asdep PRKP .....	23
Gambar 6. SK Tim Kerja Poyek Perubahan SI-PRKP .....	25
Gambar 7. Rapat Rencana Pembuatan SI-PRKP .....	26
Gambar 8. Rapat Sosialisasi Internal SI-PRKP .....	28
Gambar 9. Rapat Tindak Lanjut Bersama Stakeholder BNPP tentang SI-PRKP .....	29
Gambar 10. Peta dan Dukungan Stakeholder .....	31
Gambar 11. Strategi Marketing Proyek Perubahan .....	34
Gambar 12 Pemberian Masukan dari Mentor kepada Project Leader .....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana (Milestone) Jangka Pendek - panjang pada Proyek Prubahan .....	13
Tabel 2. Rencana Strategis Marketing Proyek Perubahan .....	19
Tabel 3. Strategi Komunikasi dengan Stakeholder .....	32
Tabel 4. Hasil Capaian Proyek Perubahan .....	37

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Deskripsi Proyek Perubahan**

Saat ini pengelolaan data penataan ruang pada unit kerja Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan belum optimal dan terstruktur dengan baik. Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan terkait penataan ruang kawasan perbatasan, maka perlunya data yang terintegrasi sebagai upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan

## **1.2 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri atas 17.504 pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 6,4 juta km<sup>2</sup> berbatasan dengan negara tetangga di 10 kawasan, baik di darat maupun di laut. Panjang garis batas negara wilayah darat totalnya adalah sepanjang 3.151 km, yaitu: (1) Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan sepanjang 2.062 km, (2) Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur sepanjang 268,8 km, dan (3) Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG di Papua sepanjang 821 km. Garis batas negara dipulau Kalimantan antara RI-Malaysia terbentang sepanjang 2.062 km (Kalimantan Barat - Serawak panjang 970 km, Kalimantan Timur - Serawak panjang 63 km, Provinsi Kalimantan Timur panjang

11 km dan sektor timur sepanjang 418 km (Kalimantan - Sabah meliputi 372 km di pulau Kalimantan, 24 km di pulau sebatik, dan 22 km chanel perairan pulau sebatik), di Papua antara RI – PNG sepanjang 821 km (darat 658 km, sungai fly 163 km). dan Nusa Tenggara Timur antara RI-Timor Leste sepanjang kurang lebih 268,8 km. Sementara untuk segmen laut wilayah Indonesia berbatasan dengan 4 negara yaitu: Malaysia, Papua Nugini, Singapura dan Timor Leste, dan 10 negara untuk segmen laut yurisdiksinya yaitu: Australia, Tiongkok, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara yang memerlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat, serta dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersamasama. Kawasan perbatasan negara sebaiknya tidak dipandang sebagai halaman belakang dan pinggiran, melainkan halaman depan negara yang penanganannya perlu mendapat perhatian secara khusus. Pembangunan di kawasan perbatasan memiliki kecenderungan tertinggal jika dilihat dari sisi ketersediaan sarana-prasarana pendukung, sehingga banyak berdampak pada kondisi sosial perekonomian masyarakat. Permasalahan tersebut akan menjadi isu yang sangat menarik dalam pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda terdepan.

Isu-isu yang menjadi sorotan dalam pembangunan kawasan berbatasan memunculkan kesan kurangnya pendekatan pembangunan yang digunakan dimasa lampau. Pada masa sebelum diberlakukannya Undang-Undang No 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) pendekatan pembangunan lebih menekankan pada keamanan (security) dibanding dengan peningkatan kesejahteraan (prosperity). Apabila kita memperhatikan kondisi sosial, politik, dan keamanan pada masa itu, terdapat kesan kuat bahwa dalam pengembangan kawasan perbatasan lebih menekankan aspek dan pendekatan keamanan. Berbeda dengan situasi keamanan saat ini yang semakin kondusif, dan dengan adanya proses

globalisasi yang ditandai dengan berbagai kerjasama ekonomi baik regional maupun subregional, maka pendekatan keamanan perlu disertai dengan pendekatan kesejahteraan secara seimbang.

Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan telah dijabarkan dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan, antara lain (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005- 2025 mengubah cara pandang pengelolaan perbatasan negara dari inward looking menjadi outward looking, sehingga pendekatan keamanan (security approach) yang digunakan di masa lampau perlu juga disertai dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pelestarian lingkungan terluar Indonesia. (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Perbatasan saat ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan. (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. (4) Secara tegas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 menetapkan 38 kota di kawasan perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berfungsi sebagai pos lintas batas negara, pintu gerbang internasional, simpul transportasi utama, serta Pusat pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan kawasan perbatasan tidak terlepas dari potensi sumberdaya. Potensi sumberdaya yang dapat dikelola di kawasan perbatasan secara umum berasal dari sumber-sumber alami dan sumber-sumber manusiawi yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat perbatasan. Potensi sumberdaya tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu potensi fisik dan non fisik. Kedua sumberdaya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan kawasan perbatasan. Secara umum potensi sumberdaya kawasan perbatasan darat cukup besar dan bernilai ekonomi sangat tinggi, terdiri dari hutan produksi (konversi), hutan lindung, dan danau alam yang dapat dikembangkan menjadi daerah wisata alam (ekowisata). Beberapa sumberdaya

alam tersebut saat ini berstatus taman nasional dan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya seperti Cagar Alam Gunung Nyiut, Taman Nasional Betung Kerihun, Suaka Margasatwa Danau Sentarum di Kalimantan Barat, serta Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur. Selain sumberdaya hutan, kawasan perbatasan juga memiliki potensi sumberdaya air yang cukup besar dari sungaisungai yang mengalir di sepanjang perbatasan. Potensi sumberdaya mineral banyak ditemukan di wilayah perbatasan yang berada di dalam tanah yang belum dikembangkan seperti tembaga, emas, dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Potensi sumberdaya alam lainnya yang cukup besar lahan pertanian di sepanjang perbatasan tergolong belum dikembangkan dengan baik.

Potensi sumberdaya laut yang ada di sepanjang perbatasan laut dan di pulau-pulau terluar cukup besar dan bernilai ekonomi dan lingkungan yang tinggi. Potensi sumberdaya laut ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam upaya melaksanakan akselerasi dan pembangunan sektor perikanan & kelautan. Kondisi ini telah menghantar konsensus politik nasional untuk mengembangkan sektor kelautan & perikanan sebagai salah satu andalan Pemasukan Negara (leading sector) dalam mendukung dan mengembangkan pembangunan nasional secara komprehensif yang berkelanjutan (sustainable development). Sebagai contoh beberapa pulau di Kepulauan Riau dapat dikembangkan sebagai kawasan konservasi penyu dan kawasan wisata bahari. Selain itu, cukup banyak pula pulau yang memiliki potensi perikanan sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan perbatasan tidak terlepas juga dari kondisi sumberdaya manusia (SDM). Secara kuantitas maupun kualitas SDM yang ada diperbatasan harus dipandang sebagai kekuatan yang potensial untuk dikembangkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan. Potensi SDM yang ada di kawasan perbatasan harus ditingkatkan terutama dibidang pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan kapasitasnya sehingga akan menjadi kekuatan yang besar dalam mengelola potensi sumberdaya alamnya.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mempertimbangkan dengan tegas peran penting kawasan perbatasan tersebut. Sebagai beranda depan negara, kawasan perbatasan negara ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan 9 (sembilan) kawasan perbatasan negara sebagai KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, dengan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat utama perbatasan negara dan atau sebagai pintu gerbang ke negara tetangga.



Gambar 1. Sebaran Peraturan presiden Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Dalam prosesnya, kemudian diambil kebijakan untuk menyusun 9 (sembilan) rencana tata ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara. Kesembilan RTR tersebut, yaitu RTR Kawasan Perbatasan Negara di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara-Provinsi Gorontalo-Provinsi Sulawesi Tengah-Provinsi Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat, RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua, RTR Kawasan Perbatasan

Negara di Provinsi Maluku, RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta RTR Kawasan Perbatasan Negara dengan Laut Lepas.

Terdapat 8 (delapan) RTR Kawasan Perbatasan Negara yang telah terbit, yaitu:

1. Perpres Nomor 179 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
2. Perpres Nomor 31 Tahun 2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan,
3. Perpres Nomor 32 Tahun 2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Papua,
4. Perpres Nomor 33 Tahun 2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku,
5. Perpres Nomor 34 Tahun 2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat,
6. Perpres Nomor 11 Tahun 2017 tentang RTR KPN di Sulut, Gorontalo, Sulteng, Kaltim dan Kaltara,
7. Perpres Nomor 49 Tahun 2018 tentang RTR KPN di Aceh dan Sumut, dan
8. Perpres Nomor 43 Tahun 2020 tentang RTR KPN di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Sedangkan satu RTR Kawasan Perbatasan Negara, yaitu RTR Kawasan Perbatasan Negara dengan Laut Lepas masih dalam proses penyusunan materi teknis.

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan penataan ruang kawasan perbatasan.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah pada dasarnya berubah seiring berjalanya waktu. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya pembangunan yang sangat cepat dan pesat sehingga menuntut

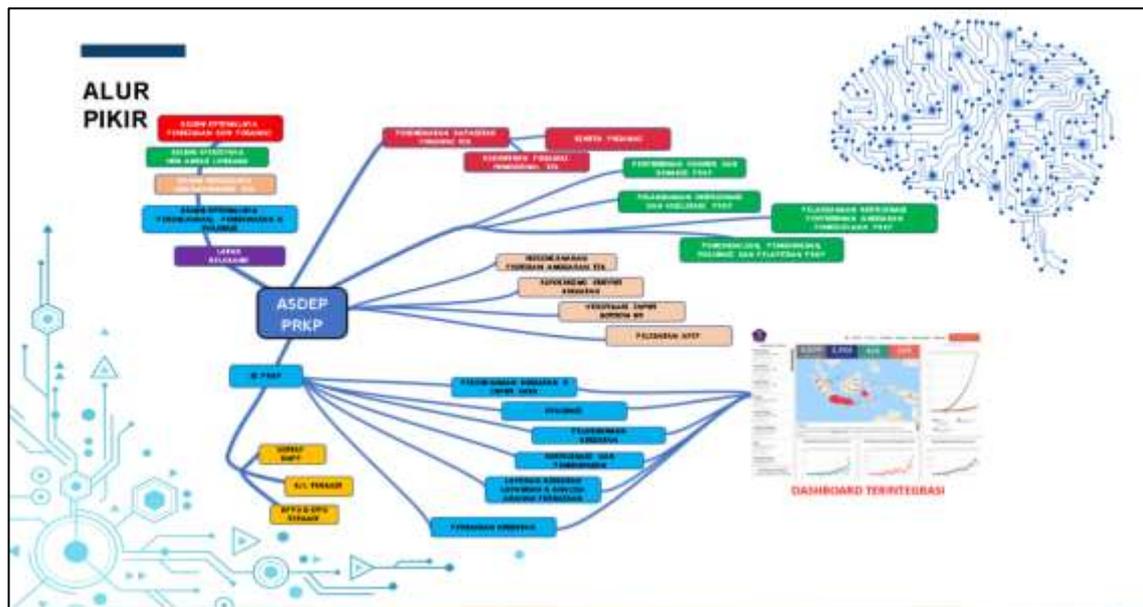
pemerintah untuk membuat tindakan antisipasi terhadap perubahan yang berjalan serta dampak yang menyertai perubahan tersebut (Kalangi, 2022). Perkembangan wilayah diikuti oleh peningkatan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi serta pemanfaatan dan fasilitas pendukung di mana dapat memberikan kontribusi terhadap kegiatan penataan ruang terutama dalam aspek perencanaan ruang untuk mengantisipasi segala bentuk kecenderungan perkembangan yang terjadi.

Tata ruang membutuhkan perencanaan dimana peran perencanaan sangat dibutuhkan dalam menciptakan kondisi yang seimbang dan berkesinambungan antara kebutuhan serta ketersediaan yang mencakup aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan tersebut terdapat unsur-unsur yang perlu untuk diperhatikan yang meliputi unsur keinginan dan cita-cita; unsur tujuan dan motivasi; unsur sumber daya (alam, manusia, modal dan informasi).

Penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Di mana dalam peraturan pemerintah tersebut pengaturan penataan ruang diselenggarakan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pada dunia modern saat ini, orientasi perkembangan teknologi mengarah kepada penggunaan jaringan internet yang berdampak kepada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Tidak luput dari perkembangan tersebut, pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi sebuah keharusan agar dapat merubah sistem birokrasi yang masih konvensional atau tradisional. Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* bahwa pengembangan *e-government* dilakukan untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dengan optimalisasi berbasis elektronik diharapkan dapat memangkas birokrasi dan meminimalisasi tindakan penyelewengan kewenangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE menjadi istilah baru pengganti e-Government, yang didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE memberikan informasi dan pelayanan meliputi: 1) Government to Citizen (G2C) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat; 2) Government to Business (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis; 3) Government to Government (G2G) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya; 4) Government to Employees (G2E) ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya dan 5) Government to Non-Profit (G2N) ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non Profit, seperti NGO, Partai Politik, dan lain-lain. Pentingnya SPBE yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai suatu kebutuhan dan tuntutan pemerintah untuk terus beradaptasi di era modern ini.



Gambar 2. Alur Pikir Penyelesaian Isu Strategis pada Asdep PRKP

Berdasarkan pengelolaannya, data dan informasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu data terstruktur dan tidak terstruktur. Pada dasarnya semua data berasal dari data tidak terstruktur, namun setelah dilakukan perlakuan tertentu terhadap data, maka data tidak terstruktur dapat berubah menjadi data terstruktur. Data terstruktur adalah data yang ditempatkan pada item-item tertentu sebagai lokasi penyimpanan dalam suatu basis data. Dengan basis data tersebut proses temu kembali informasi akan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan data yang tidak terstruktur (Kusmayadi, 2022).

Mengelola informasi dan manajemen arsip yang baik sangat penting untuk pemerintahan yang baik. Informasi merupakan salah satu aset inti pemerintah. Seperti aset lainnya, informasi perlu dikelola dengan baik agar dapat mendapatkan nilai terbaik darinya. Informasi adalah bahan bakar yang membuat pemerintahan tetap berjalan. Secara internal, informasi merupakan dasar dari analisis dan pembuatan kebijakan yang efektif. Informasi tersebut dapat menjadi bukti untuk mendukung pengambilan keputusan dan merupakan faktor penentu yang esensial. Secara eksternal, informasi mendukung akuntabilitas pegawai negeri dan instansi baik melalui publikasi maupun audit. Namun, informasi ini sering tersebar dan tidak terstruktur (The Cabinet Office, 2017).

Lemahnya kapasitas pembuat kebijakan dalam mengolah informasi menjadi evidence berpengaruh terhadap rendahnya efektifitas kebijakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan tuntutan publik. Aktor-aktor pembuat kebijakan di pusat dan daerah sering terperangkap dalam perspektif jangka pendek, kepentingan sektoral, dan kurang memiliki informasi yang memadai ketika mengambil keputusan (Suryanto, 2018). Padahal, membanjirnya informasi yang dapat diakses dengan mudah dan murah sebagai akibat dari semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi, belum memberikan kontribusi signifikan pada perbaikan proses kebijakan.

Oleh karena itu, dibutuhkan satu sistem informasi untuk menggabungkan atau menyatukan data yang tidak terstruktur dari berbagai sumber ke sebuah penyimpanan gudang data yaitu Sistem

Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (SI-PRKP). Dengan adanya gudang data yang terstruktur tersebut diharapkan Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dan Mitra Kementerian/Lembaga serta Organisasi Perangkat Daerah memiliki satu data yang sama sebagai acuan. Pembuatan keputusan dan kebijakan untuk mensinergikan antar *stakeholder* haruslah berbasiskan data yang sama dengan menerapkan praktik *evidence base policy making* dan *data-driven decision making*.

### 1.3 Tujuan

Tujuan proyek perubahan ini yaitu untuk menerapkan sistem e-Government Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai suatu kebutuhan dan tuntutan pemerintah untuk terus beradaptasi di era modern ini.

a) Tujuan Jangka Pendek

1. Terlaksananya penggunaan teknologi informasi (SI-PRKP) sebagai wadah peningkatkn literasi mengenai penataan tata ruang dalam Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan; dan
2. Penerbitan surat sestap BNPP sebagai penyampaian pemanfaatan SI-PRKP kepada K/L.

b) Tujuan Jangka Menengah

1. Konsolidasi rencana dan capian antar Kementerian/Lembaga dalam rangka memperkuat Renaksi 2023 dan 2024
2. Sinkronisasi
3. aplikasi SI-PRKP antar K/L

c) Tujuan Jangka Panjang

1. Evaluasi implementasi pemanfaatan dan/atau pengembangan penataan ruang kawasan perbatasan

2. Penguatan model pembangunann kolaboratif potensi unggulan kawasan perbatasan dengan memanfaatkan hasil konsolidasi data spasial pada 222 Lokpri; dan indeks pengelolaan kawasan perbatasan

#### **1.4 Manfaat**

##### a) Internal

1. Meningkatkan literasi pengetahuan pegawai Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan tentang penataan ruang;
2. Menyiapkan data untuk memfasilitasi kebutuhan informasi secara *up to date*, lengkap dan tepat.
3. Dapat mendukung pengambilan kebijakan/keputusan dalam rangka perencanaan strategis, pengendalian, dan kegiatan monitoring evaluasi

##### b) Eksternal

1. Menyiapkan data untuk memfasilitasi kebutuhan informasi secara *up to date*, lengkap dan tepat bagi Mitra kerja;
2. Meningkatkan keselarasan kebijakan mengenai tata ruang dengan mitra kerja.

## **BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN**

### **2.1 Output dan Outcome Proyek Perubahan**

Pada bagian ini dijelaskan output dari proyek perubahan yang akan dijalankan. Output ini merupakan hasil yang akan dicapai dari solusi yang telah dikembangkan. Output dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **2.1.1 Output**

*Output* dari proyek perubahan ini yaitu Penggunaan sistem informasi penataan ruang kawasan perbatasan (SI-PRKP). Sistem ini dapat menyimpan semua data mengenai Dasar, Perencanaan hingga Pelaporan kegiatan ke dalam satu wadah sebagai tempat penyimpanan yang dapat diakses atau dibagipakaikan oleh siapapun.

- a. Tersedianya aplikasi SI-PRKP sebagai wadah koordinasi dan optimalisasi layanan data pada penataan ruang kawasan perbatasan
- b. Tersedia Tim Kerja SI-PRKP

#### **2.1.2 Outcome**

*Outcome* dari proyek perubahan strategis ini yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan realtime. Sebagai alat konsolidasi dengan mitra kerja dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penataan ruang kawasan perbatasan.

- a. Terwujudnya pelaksanaan pelayanan data penataan ruang kawasan perbatasan yang lebih efektif dan efisien menggunakan aplikasi.
- b. Terwujudnya peningkatan layanan data di Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan sebagai alat koordinasi dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah.

### **2.2 Tahapan Perubahan Rencana Strategis**

Rencana tahapan yang akan dilaksanakan selama proses implementasi proyek perubahan. Rencana tahapan tersebut terbagi dalam time-frame yang

telah ditentukan dan disesuaikan dengan output dan outcome yang akan dicapai sesuai tujuan proyek perubahan. Berikut adalah agenda manajemen strategis

Tabel 1. Rencana (Milestone) Jangka Pendek - panjang pada Proyek Perubahan

No	Milestone	Tahapan Kegiatan	Waktu	Output
<b>Jangka Pendek</b> <b>Minggu I September s.d Minggu I Desember 2022</b>				
1	Persiapan	a) Melakukan konsultasi dengan mentor terkait aksi perubahan yang ingin dilaksanakan b) Melaksanakan Koordinasi Internal	Minggu ke – 2 September	
		a) Membuat tim supervisi internal b) Melakukan koordinasi bersama tim apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan proyek perubahan	Minggu ke – 3 September	
2	Penyusunan dan Penetapan	a) Penyusunan draft Tim Kerja proyek perubahan b) Pembuatan draft SK dan pembagian Kerja c) Penetapan SK TIM sebagai dasar tugas proyek perubahan	Minggu ke 3 September – Minggu ke 1 Oktober	
3	Koordinasi dengan K/L terkait mengenai tata ruang kawasan perbatasan	a) Mengadakan pembahasan mengenai tata ruang dengan kementerian dan lembaga terkait b) Mensosialisasikan rencana pembuatan aplikasi SI-PRKP	Minggu ke 2 Okt	
4	Mengidentifikasi relasi dan penyeragaman database	a) Identifikasi potensi dan masalah dokumen di Penataan Ruang Kawasan Perbatasan b) Menganalisa hasil identifikasi potensi dan masalah pengelolaan kawasan perbatasan negara	Minggu ke 3 Okt	

No	Milestone	Tahapan Kegiatan	Waktu	Output
5	Penyusunan Model Entity Relationship	a) Menyusun draf model perancangan kolaboratif SI-PRKP b) Melakukan pembahasan draft model perancangan <i>database</i> SI-PRKP	Minggu ke 4 Okt	
6	Membangun penyimpanan satu data ( <i>Big Data</i> )	a) Berkoordinasi dengan tim pembuatan penyimpanan b) Merancang pembangunan penyimpanan satu data perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang c) Mencoba sistem penyimpanan dalam skalah sederhana	Minggu ke 1 Nov – Minggu ke 2 Nov	
5	Mencoba sistem Aplikasi penyimpanan data (SI-PRKP)	a) Berkonsultasi dengan mentor b) Mengadakan sosialisasi di lingkungan intenal c) Mengadakan sosialisasi di lingkungan eksternal d) Menerima masukan dan kritikan	Minggu ke 3 Nov	
6	Finalisasi Aplikasi SI-PRKP	a) Melakukan finalisasi terhadap penyimpanan data b) Berkonsultasi dengan mentor	Minggu ke 4 Nov	
7	Pelaporan	Pembuatan pelaporan atas proyek perubahan	Minggu ke 1 Des	

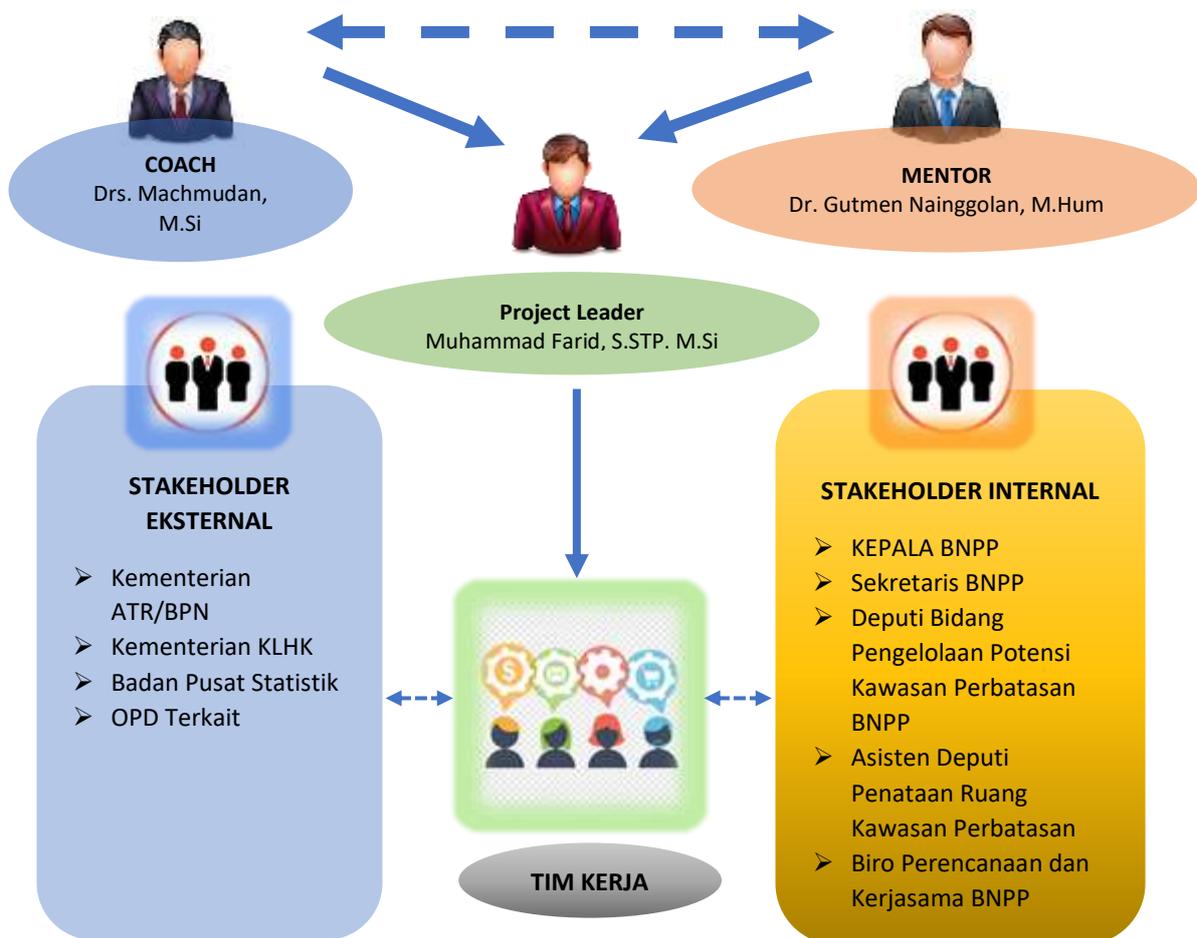
No	Milestone	Tahapan Kegiatan	Waktu	Output
<b>Jangka Menengah 1 Tahun (Januari -Desember 2023)</b>				

No	Milestone	Tahapan Kegiatan	Waktu	Output
1	Tersusunnya Draft Rencana Aksi Berbasis Aplikasi SI_PRKP dari K/L Terkait	a) Mengumpulkan Rencana Aksi dari mitra K/L b) Menyiapkan media website untuk penyimpanan database Rencana Aksi	Bulan Januari – Maret 2023	
2	Sosialisasi Aplikasi SI_PRKP ke K/L Terkait	a) Mengadakan tutorial penggunaan aplikasi kepada mitra K/L b) Memberikan evaluasi dan reviu layanan aplikasi SI-PRKP terhadap mitra K/L	Bulan April – Juni 2023	
3	Penginputan Rencana Aksi dari Mitra K/L	a) Memasukkan Rencana Aksi dari masing-masing mitra K/L b) Melakukan Reviu Terhadap Rencana Aksi dari masing-masing K/L	Bulan Juli - September 2023	
4	Penginputan Kegiatan Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan ke Aplikasi SI-PRKP	a) Memilih kegiatan Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan yang akan diupload b) Membuat Folder penyimpanan data kegiatan Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	Bulan Oktober – Desember 2023	
<b>Jangka Panjang 2 Tahun (2024 – 2025)</b>				
1	Evaluasi Implementasi pemanfaatan dan/atau pengembangan penataan ruang kawasan perbatasan	a) Implementasi penyampaian kegiatan Rencana Aksi dari mitra K/L	Tahun 2024	
2	Penguatan model pembangunan kolaboratif potensi unggulan	a) Melakukan evaluasi terhadap layanan SI-PRKP kepada mitra K/L terkait	Tahun 2025	

No	Milestone	Tahapan Kegiatan	Waktu	Output
	kawasan perbatasan			

### 2.3 Tata Kelola Proyek

Tata laksana proyek perubahan merupakan struktur organisasi tim efektif dalam pelaksanaan proyek perubahan. Struktur Organisasi Tim ini menjelaskan siapa mengerjakan apa, dan bertanggung jawab kepada siapa, serta apa yang dikerjakan dari bagian kegiatan pelaksanaan proyek perubahan. Berikut ini Tata Kelola Proyek Perubahan



Gambar 3. Tata Kelola Proyek Perubahan

Berikut ini diuraikan sebagaimana mobilisasi sumber daya manusia melalui pendekatan peran dan tugas dari seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan alur perubahan ini, yaitu :

## 1. Mentor

- a. Bertindak sebagai pembimbing sekaligus pengawas reformer secara professional serta berperan sebagai inspirator dan motivator;
- b. Memberikan arahan, dukungan, dan petunjuk dalam keseluruhan pelaksanaan aksi perubahan;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan untuk mengatasi masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan aksi perubahan;
- d. Menerima laporan dan memantau jalannya aksi perubahan yang dilakukan oleh reformer.

## 2) Project Leader

- a. Menyusun ide, gagasan dan rencana aksi perubahan;
- b. Menyusun tahapan rencana aksi perubahan;
- c. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan aksi perubahan;
- d. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder;
- e. Membentuk tim kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi perubahan dan melakukan kerjasama dengan tim kerja;
- f. Melaksanakan seluruh tahapan yang telah dirancang;
- g. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada mentor dan coach untuk mendapatkan evaluasi dan saran terhadap aksi perubahan;
- h. Menyusun laporan akhir aksi perubahan.

## 3) Coach

- a. Melakukan diskusi dan memberikan masukan reformer dalam menyusun rancangan aksi perubahan;
- b. Memonitor kegiatan reformer selama tahap aktualisasi aksi perubahan;
- c. Melakukan intervensi bila reformer mengalami permasalahan sesuai kewenangan coach;
- d. Melakukan komunikasi dengan mentor terkait kegiatan reformer selama tahap aktualisasi aksi perubahan;

- e. Memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan persetujuan kepada reformer dalam penyusunan aksi perubahan;
- f. Melakukan monitoring kegiatan reformer selama tahap aktualisasi kepemimpinan;
- g. Memberikan feedback terhadap laporan perkembangan implementasi aksi perubahan dari reformer;
- h. Memfasilitasi jika reformer mengalami kesulitan;
- i. Mendukung pelaksanaan aksi perubahan;
- j. Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu reformer apabila mengalami permasalahan.

#### 4) Tim Kerja

- a. Melakukan koordinasi awal dan berkelanjutan dengan semua Stakeholder untuk membuat jejaring yang kuat;
- b. Membantu dan mendukung project leader dalam merencanakan, merancang instrument yang diperlukan;
- c. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait;
- d. Melaporkan progress kegiatan secara berkala kepada Mentor Project Leader;
- e. Melakukan finalisasi dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama, Biro Hukum Organisasi Kepegawaian, Biro Keuangan Umum Hubungan Masyarakat.

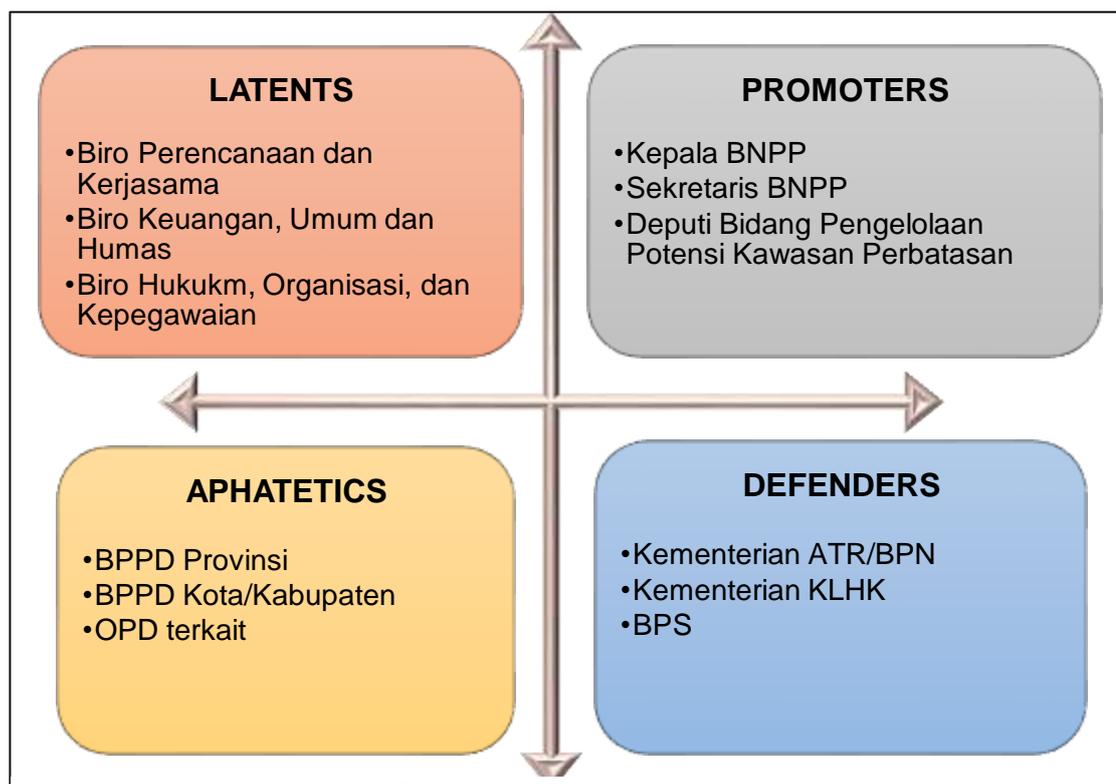
## **2.4 Rencana Strategis Marketing Proyek Perubahan**

### 2.4.1 Identifikasi Stakeholder

Pemangku kepentingan atau Stakeholder adalah pihak – pihak baik dari dalam dan luar (internal dan eksternal) yang memiliki kepentingan dan mempunyai kinerja, eksistensi dalam keberlangsungan organisasi. Dalam hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Strategis Marketing Proyek Perubahan

No	Internal	Eksternal
1	Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
2	Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan	Badan Pusat Statistik
4	Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi di seluruh wilayah perbatasan
5	Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian	Organisasi Perangkat Daerah terkait bidang penataan ruang di seluruh wilayah perbatasan
6	Biro Perencanaan dan Kerjasama	
7	Biro Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat	



Gambar 4. Peran Stakeholder

## Peran Stakeholder:

1. **Promotors** memiliki baik kepentingan dan pengaruh yang besar terhadap upaya dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil.
2. **Defenders** memiliki pengaruh / kekuatan rendah tetapi keterkaitan kepentingan tinggi untuk mempengaruhi upaya pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas.
3. **Latents** memiliki pengaruh tinggi tetapi memiliki kepentingan rendah dalam kaitannya dengan project yang dilaksanakan oleh project leader.
4. **Apathetics** kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan bahkan mungkin tidak mengetahui adanya upaya

Adapun cara atau metode yang digunakan untuk mengelola dan mempengaruhi stakeholder atau Jejaring Kerja serta strategi komunikasinya adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Stakeholders **Promoters**, teknik komunikasi harus diperlakukan dengan respek, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dilibatkan dalam pekerjaan agar memperkuat posisinya (key Players);
2. Terhadap Stakeholders **Latents**, harus diyakinkan akan pentingnya aksi perubahan bagi peningkatan kinerja organisasi, melakukan komunikasi intens dan selalu memberikan informasi progres aksi yang dilaksanakan (keep satisfied);
3. Terhadap Stakeholders **Defenders**, harus selalu menjalin komunikasi dan selalu menyampaikan informasi, lakukan mentoring atau training agar mereka tetap terhubung dengan aksi perubahan (keep informed);
4. Terhadap Stakeholders **Apathetics**, harus Tetap menjaga hubungan dan menghargai penentang, tetap sampaikan informasi tapi jangan terlalu sering agar tidak terkesan mengganggu, memberi semangat, memuji dan mengapresiasi setiap tindakan mereka dan secara terus (minimal effort).

#### 2.4.2 Strategi Marketing

Strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu 4 P 1 C (Product, Price, Promotion, Place dan customer).

a) Customer

Sasaran utama sebagai customer untuk menggunakan produk ini adalah mitra kementerian dan lembaga dalam memasukkan rencana aksi dan rencana kerja kementerian dan lembaga mitra ke dalam system informasi satu data penataan ruang kawasan perbatasan.

b) Product

Product yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi secara satu atap dan dapat diakses oleh siapaapaun dalam memasukkan rencana aksi dan rencana kerja Kementerian/lembaga mitra Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

c) Price

Price ditekankan aspek efisiensi dan efektivitas dari proyek perubahan ini, baik dari sisi waktu, biaya, tenaga dan tingkat akurasi data capaian kinerja, serta dari sisi manfaat, Aplikasi ini meningkatkan penggunaan teknologi informasi, kinerja staf Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

d) Place

Proyek perubahan ini dilaksanakan pada Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

e) Promotion

Strategi komunikasi yang digunakan dalam proyek perubahan ini melalui konsultasi, sosialisasi dan edukasi serta koordinasi untuk meningkatkan sinergitas dengan unit terkait dalam Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, serta kombinasi untuk mendapatkan dukungan berupa bimbingan dan arahan oleh pembuat kebijakan.

## **BAB III IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN**

### **3.1 Pengalaman Memimpin Perubahan**

Implementasi proyek perubahan merupakan pelaksanaan komitmen, selama dua bulan melaksanakan janji sebagaimana direncanakan dalam Rancangan proyek Perubahan (RPP). Proyek perubahan pada PKN II bukan hanya sekedar “*change*” namun harus mampu menampilkan *innovation* dalam implementasi guna meningkatkan produktivitas kinerja instansi.

Pada proses pelatihan kepemimpinan ini, *project leader* akan mengimplementasikan proyek perubahan kedalam 3 tahap (milestone), yaitu rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Laporan implementasi ini akan fokus pada implementasi proyek perubahan tahap jangka pendek yang dilaksanakan pada minggu ke-2 September hingga Minggu pertama bulan Desember.

#### **3.1.1 Rapat Koordinasi Internal**

Pada tahap ini Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, BNPP selaku *Project Leader* mengundang stakeholder internal untuk melakukan rapat koordinasi internal dengan agenda memaparkan rencana implementasi proyek perubahan, serta memilih dan menunjuk personal-personal di ke-Asdepan PRKP untuk turut serta aktif dalam proyek perubahan.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Perencana Ahli Madya, Perencana Ahli Muda dan staff pada asdep PRKP. Maskud dari kegiatan ini adalah agar unsur internal mengetahui dan memahami tentang implemmentasi proyek perubahan serta adanya saran-saran strategis untuk efektivitas dalam implementasi proyek perubahan serta tersusunya personal-personal dalam tim SI PRKP. Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober Tahun 2022 bertempat di ruang rapat Lantai IV, Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan



Gambar 5 Kegiatan Rapat Koordinasi Internal Asdep PRKP

Pada tahap rapat ini dihasilkan beberapa kesimpulan bahwa proyek perubahan ini akan didukung oleh beberapa personil yang akan dibagi menjadi 3 tim yaitu

- a) Kelompok kerja Identifikasi relasi dan penyeragaman *database*, mempunyai tugas :
  1. Melakukan identifikasi potensi dan masalah dokumentasi tata ruang kawasan perbatasan
  2. Melakukan analisa hasil identifikasi potensi dan masalah pengelolaan kawasan perbatasan; dan
  3. Melaporkan analisa identifikasi potensi dan masalah pengelolaan potensi kawasan perbatasan kepada ketua
- b) Kelompok kerja penyusunan model *entity relationship* diagram, mempunyai tugas :

1. Menyusun model perancangan kolaboratif sistem informasi penataan ruang kawasan perbatasan;
  2. Melakukan pembahasan model perancangan database sistem informasi penataan ruang kawasan perbatasan;
  3. Melakukan koordinasi dengan kedeputian dan keasdepan terkait
  4. Melakukan finalisasi model perancangan sistem informasi penataan ruang kawasan perbatasan; dan
  5. Melaporkan hasil penyusunan model perancangan sistem informasi penataan ruang kawasan perbatasan kepada ketua
- a) Kelompok kerja publikasi dan dokumentasi
1. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendokumentasian; dan
  2. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan publikasi, dan media

### 3.1.2 Penyusunan Draft, Finalisasi serta Penandatanganan dan Penerbitan SK TIM

Setelah dilaksanakan rapat koordinasi internal yang salah satu agendanya adalah pemilihan dan penunjukan personal-personal tim dilanjutkan dengan menyusun draft Surat Keputusan. Tim ini yang akan membantu *project leader* dalam melaksanakan tahapan-tahapan (*milestone*) proyek perubahan jangka pendek. Tim kerja tersebut terdiri dari bidang dan bagian yang disesuaikan dengan kompetensi dan keahlian masing-masing personel. Kegiatan penyusunan tim kerja sudah dimulai pada tanggal 30 September hingga tahap finalisasi serta penandatanganan SK tim kerja dilaksanakan pada hari Jumat, 28 Oktober 2022. Tim kerja dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 35.04-294 Tahun 2022 tentang Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Integrasi dan Optimalisasi Layanan Data Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara Melalui Sistem Informasi Penataan Ruang kawasa Perbatasan Tahun Anggaran 2022.



- Pola ruang PKSN di Negara Indonesia
- Struktur ruang PKSN pada Negara Indonesia
- Indikasi program Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
- Dilenasi PKSN
- Model Entitas
  - Program rencana Aksi Mitra Kementerian/Lembaga Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
  - Sebaran dan lokasi kegiatan
  - Diagram jumlah kegiatan



Gambar 7. Rapat Rencana Pembuatan SI-PRKP

### 3.1.4 Rapat Koordinasi Internal SI PRKP

Rapat koordinasi bertujuan untuk mensosialisasikan hasil pembuatan aplikasi SI PRKP pada lingkungan internal ke asdepan PRKP yang dilakukan secara hybrid (offlane dan online) yang dihadiri oleh perencana Ahli Madya,

Perencana Ahli Muda dan Staff pada Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan serta Ahli pembuatan aplikasi dari PT. Webgis Indonesia pada tanggal 04 November Tahun 2022, bertempat di ruang rapat utama Lt. II Kantor BNPP. . Berdasarkan hasil rapat ini disimpulkan bahwa :

Lingkup Lengkap SI-PRKP terdiri dari:

1. Integrasi data: (RTR KPN, Usulan RenAksi, Hasil Monev, dsb.)
  2. Optimalisasi layanan data: (Publikasi Peta dalam bentuk web map services, Publikasi data dalam bentuk API)
  3. Inputing data renaksi (Aplikasi web, Menangani siklus: Usulan - evaluasi usulan – penetapan pagu – pelelangan – pelaksanaan – monev kegiatan)
1. Integrasi Data, mencakup:
    - Daftar Perpres RTR KPN serta indikasi programnya;
    - Integrasi Peta RDTR interaktif Kemen ATR dengan lokasi LOKPRI daerah Perbatasan; dan
    - ATR menyediakan data RDTR yang telah disahkan dalam perpres, dari PRKP BNPP.
  2. Optimalisasi Data, mencakup :
    - Pembuatan Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan dnegan menampilkan seluruh kecamatan perbatasan;
    - Delineasi Kecamatan, delineasi desa, serta informasi kecamatan dapat ditampilkan di SI-PRKP; dan
    - Ada sampling kecamatan pada masing-masing PKSN.





Gambar 8. Rapat Sosialisasi Internal SI-PRKP

### 3.1.5 Rapat Tindak Lanjut Koordinasi Internal SI PRKP

Rapat tindak lanjut ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang pertama sekaligus mensosialisasikan aplikasi SIPRKP kepada stakeholder BNPP, rapat dilaksanakan secara hybrid (offline dan online) yang dihadiri oleh Perencana Ahli Madya, Perencana Ahli Muda pada lingkup setap BNPP, staff pada lingkup setap BNPP, Tenaga Ahli pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, serta tenaga ahli pada PT.Webgis Indonesia pada tanggal 15 November Tahun 2022, bertempat di ruang rapat Lt. IV Kantor BNPP. . Berdasarkan hasil rapat ini disimpulkan bahwa :

1. Diperlukan tampilan yang lebih informatif dan responsif;
2. Diperhatikan ketersediaan data antar lembaga sehingga system informasi dapat sinkron dengan system yang sudah ada;
3. Perlu koordinasi dan tindak lanjut terkait pertukaran API/Server GIS Online oleh biro PK;
4. Diperhatikan Kembali terkait regulasi yang termaktub dalam Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Diperlukan pencermatan dalam menjaring renaksi K/L sehingga aplikasi yang ada di BNPP tidak tumpang tindih; dan
6. Diperlukan koordinasi Kembali terkait izin pembuatan system baru dengan melihat regulasi SPBE;



*Gambar 9. Rapat Tindak Lanjut Bersama Stakeholder BNPP tentang SI-PRKP*

### **3.2 Implementasi Strategi Marketing Proyek Perubahan**

Kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk mengantisipasi melihat ke depan, mempertahankan fleksibilitas dan memberdayakan sumberdaya manusia untuk menciptakan perubahan strategi yang diperlukan. Seorang pemimpin organisasi dituntut untuk memiliki kemampuan tersebut guna membangun organisasi yang adaptif dan agile. Deskripsi kepemimpinan strategis pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II sampai dengan proses pelaksanaan Laboratorium Kepemimpinan adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan tujuan perubahan yang akan diharapkan. Tujuan perubahan ini termasuk didalamnya area perubahan yang terdampak. Penentuan tujuan ini tidak keluar dari tupoksi yang menjadi tanggung jawab seorang pemimpin.
- b. Menentukan gambaran kondisi saat ini (existing condition) dan kondisi yang akan diharapkan . Bila existing condition dibiarkan apa akibat yang muncul yang menghambat kinerja organisasi. Sebaliknya bila akan ditangani maka proses yang dilalui adalah membaca gejalagejala perubahan yang muncul, termasuk proses pengamatan.

- c. .berbagai jenis penyebab permasalahan sehingga organisasi berjalan stagnan, lambat, tidak produktif dan kinerja tidak optimal sesuai dengan indikator-indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan. Diagnostic Reading dilakukan melalui telaahan rencana strategis organisasi dan identifikasi isu aktual dan faktual yang menjadi perhatian utama. Dalam penentuan persoalan ini seorang pemimpin perubahan (adaptive leader) harus dapat menempatkan diri seobjektif mungkin dan terlepas dari konflik kepentingan.
- d. Menemukan akar dari permasalahan dan menentukan inovasi berupa terobosan yang akan dihasilkan untuk mencapai konisi yang diinginkan. Terobosan ini dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu : SOP; sarana prasarana atau sikap & perilaku.
- e. Menentukan stakeholder yang terlibat untuk melaksanakan inovasi serta membangun tim efektif. Untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder, seorang pemimpin harus dapat menjelaskan mengapa proyek perubahan ini penting untuk dilakukan. Pendekatan adaptif yang dijelaskan di atas yang harus dilakukan, karena dalam mematangkan rencana kerja, perlu masukan dari setiap stakeholder yang terdampak dari perubahan.
- f. Tahapan pencapaian tujuan proyek perubahan dibagi dalam jangka pendek, menengah dan panjang dengan rincian kegiatan, waktu, output dan stakeholder dari setiap tahapan.

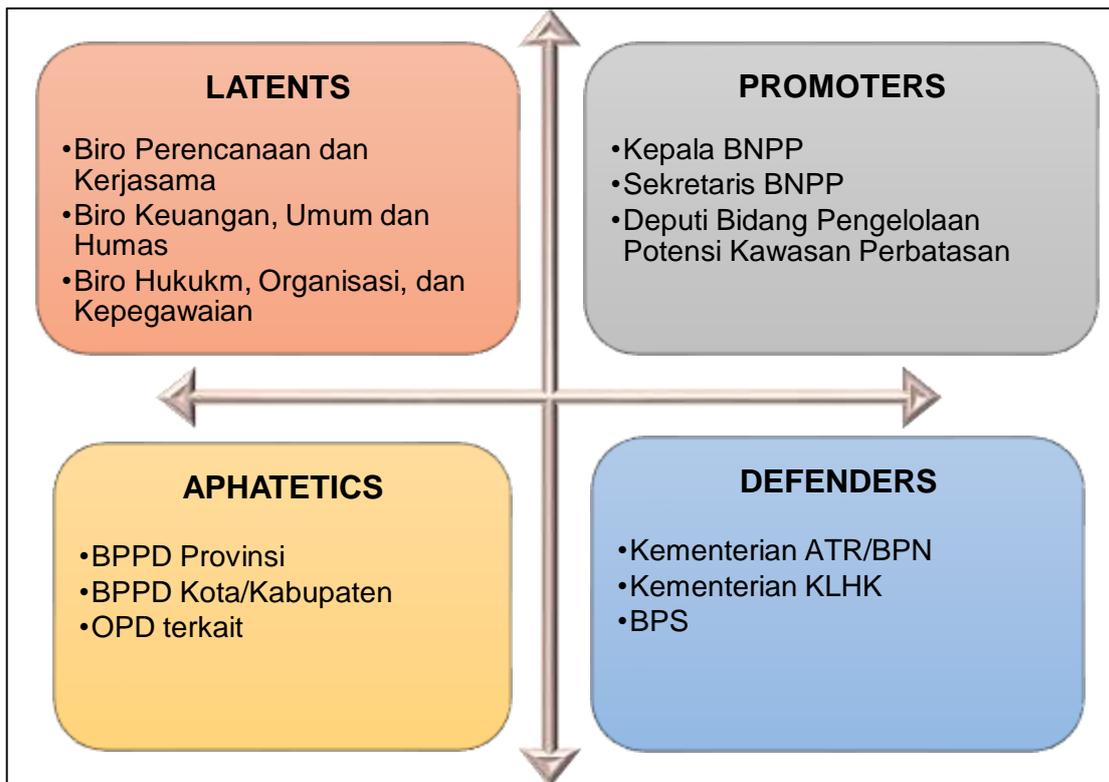
### 3.2.1 Implementasi Strategi marketing

Implementasi proyek perubahan “Integrasi dan Optimalisasi Layanan Data Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Melalui Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (SI-PRKP)” merupakan terobosan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dalam menjawab tuntutan isu faktual yaitu belum adanya layanan integrasi data tata ruang yang efektif dan efisien. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi proyek perubahan adalah dukungan stakeholder terkait baik internal maupun eksternal. Beberapa manfaat yang didapatkan dari peran dan dukungan stakeholder antara lain: 1) Mendapatkan lebih banyak gagasan pengembangan dan implementasi proyek perubahan; 2) Dapat memberikan

gambaran lebih jelas tentang konteks komunitas, potensi kesulitan, dan aset yang ada; 3) Rasa memiliki (Sense of Ownership) terhadap proyek perubahan; 4) Meminimalisir penolakan terhadap proyek perubahan ; 5) Memperkuat posisi organisasi terhadap stakeholders yang melakukan penolakan; 6) Menjembatani modal sosial bagi komunitas; 7) Meningkatkan kredibilitas organisasi; 8) Meningkatkan peluang keberhasilan proyek perubahan.

### 3.2.2 Peta dan Dukungan Stakeholders

Pemetaan stakeholder diperoleh melalui proses identifikasi para stakeholder yang terlibat dan terkena dampak dari proyek perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian diidentifikasi lagi sifat dukungan dari masing-masing stakeholder positif (+), negatif (-), atau netral (+/-). Stakeholder yang memiliki dukungan positif berarti mendukung dan diprediksi akan mendukung karena menerima dampak positif dari proyek perubahan. Selanjutnya stakeholder juga akan diidentifikasi terkait tinggi rendahnya kepentingan dan tinggi rendahnya pengaruh terhadap proyek perubahan. Setelah mengidentifikasi stakeholder yang mempengaruhi proyek perubahan ini,



Gambar 10. Peta dan Dukungan Stakeholder

Tabel 3. Strategi Komunikasi dengan Stakeholder

Kelompok Stakeholder	Strategi Komunikasi
<i>Promotors</i>	<p>Kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh besar untuk mendukung terhadap keberhasilan proyek perubahan dan sebaliknya;</p> <p>Strategi komunikasi yang dilakukan :</p> <p>Strategi komunikasi yang dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi dengan cara memberikan informasi untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang diusulkan sangat perlu dan berguna;</li> <li>• Hal-hal yang dikomunikasikan adalah dengan menyampaikan maksud,tujuan, manfaat, output yang dihasilkan serta dampak dari proyek perubahan;</li> <li>• Dalam menyampaikan hal-hal tersebut harus dengan penuh rasa percaya diri, tegas dan proyek perubahan relatif mudah diaplikasikan, fleksibel dan bermanfaat bagi masyarakat dan organisasi.</li> </ul>
<i>Latens</i>	<p>Kelompok yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan, tapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka tertarik. Strategi komunikasi yang dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun komunikasi dengan memberikan informasi mengenai maksud, tujuan, sasaran, manfaat dan output yang dihasilkan;</li> <li>• Selalu bersikap sopan, profesional serta memperlakukan mereka dengan baik.</li> </ul>
<i>Defenders</i>	<p>Kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan dan menyuarakan dukungan besar, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan. Strategi komunikasi yang dilakukan :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkomunikasi dengan memberikan motivasi bahwa kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas dan merupakan ajang pembuktian diri, kemampuan dan prestasi kerja;</li> <li>• Berusaha memberi semangat dan motivasi untuk keberhasilan proyek perubahan;</li> <li>• Bila memungkinkan dapat melibatkan mereka dalam mengambil keputusan.</li> </ul>
<i>Apathetics</i>	Kelompok stakeholders yang tidak memiliki kepentingan dan kekuatan terhadap proyek perubahan yang dilaksanakan. Strategi komunikasi yang dilakukan : Memberi informasi seperlunya dan menjaga agar tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan proyek perubahan.

### 3.2.3 Strategi Marketing

Pembentukan dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dalam proyek perubahan ini menempatkan masyarakat sebagai yang dilayani/customer. Sosial marketing dalam proyek perubahan ini yaitu merancang dan mengimplementasikan pembentukan Layanan SI PRKP dengan tujuan agar terjadi peningkatan pelayanan dan kualitas secara signifikan. Hal ini ditempuh melalui langkah-langkah kebijakan terstruktur dan sistematis melalui terobosan terobosan strategis.

Berdasarkan hal tersebut, maka strategi marketing sektor publik dengan pola "4P + 1C" yang dijalankan dapat dirumuskan sebagai berikut :

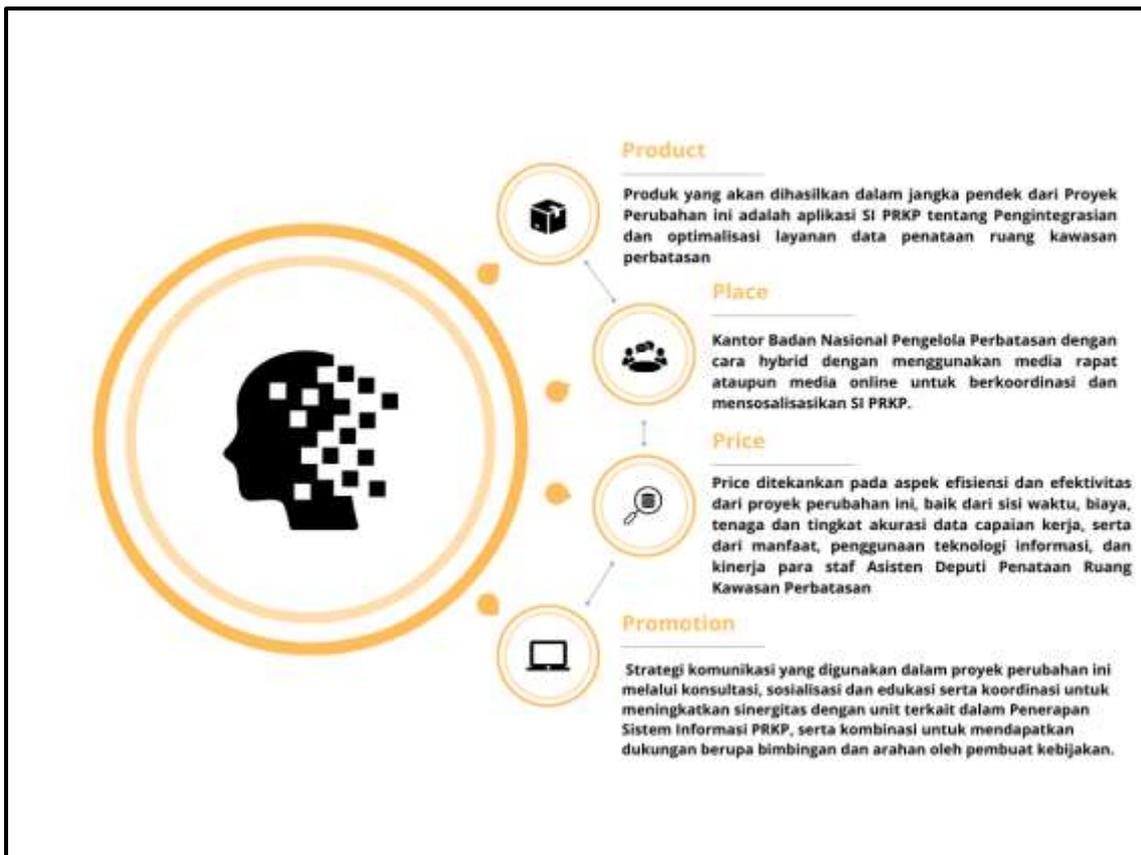
#### 1) Product

Produk yang akan dihasilkan dalam jangka pendek dari Proyek Perubahan ini adalah aplikasi SI PRKP tentang Pengintegrasian dan optimalisasi layanan data penataan ruang kawasan perbatasan yang akan dilanjutkan pada tahap Jangka Menengah dan Panjang dengan mengajak lebih banyak stakeholder eksternal seperti Kementerian dan Lembaga mitra Asdep PRKP,

serta pemernitah daerah khusus kawasan perbatasan untuk dapat mengoptimalkan layanan data sebagai langkah koordinasi pengambil kebijakan.

## 2) Place

Tempat yang digunakan untuk melakukan marketing terhadap produk proper adalah Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan cara hybrid dengan menggunakan media rapat ataupun media online untuk berkoordinasi dan mensosialisasikan SI PRKP.



Gambar 11. Strategi Marketing Proyek Perubahan

## 3) Price

Price ditekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas dari proyek perubahan ini, baik dari sisi waktu, biaya, tenaga dan tingkat akurasi data capaian kerja, serta dari manfaat, penggunaan teknologi informasi, dan kinerja para staf Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan.

#### 4) Promotion

Strategi komunikasi yang digunakan dalam proyek perubahan ini melalui konsultasi, sosialisasi dan edukasi serta koordinasi untuk meningkatkan sinergitas dengan unit terkait dalam Penerapan Sistem Informasi PRKP, serta kombinasi untuk mendapatkan dukungan berupa bimbingan dan arahan oleh pembuat kebijakan.

#### 5) *Customer*

Yang dimaksud *customer* dalam proyek perubahan ini seluruh stakeholder dan masyarakat yang ada di kawasan perbatasan. Selain itu para mitra Asdep PRKP yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Pusat Statistik.

### **3.3 Strategi Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran**

Pelaksanaan proyek perubahan ini merupakan wahana pembelajaran kepemimpinan di Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi. Pengembangan kapasitas diri dilaksanakan melalui pembelajaran kepemimpinan dengan tahapan pengembangan, penyebaran dan penerapan pengetahuan baru. Pemimpin dan pegawai dalam organisasi pembelajar akan secara sengaja mengubah perilakunya untuk merefleksikan pengetahuan dan pemahaman yang baru. Pada saat pembekalan sebelum dilaksanakannya Laboratorium Kepemimpinan, diingatkan bahwa sebuah proyek perubahan merupakan wahana pembelajaran kepemimpinan dengan bimbingan coach dan mentor, kolaborasi mengarahkan tim efektif yang berasal dari stakeholders internal (tim agile) organisasi serta kerjasama dengan stakeholders eksternal. Organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi pembelajaran, yaitu organisasi yang para pegawainya secara berkelanjutan mengembangkan kapasitasnya untuk mewujudkan kinerja yang diinginkan. Salah satu tugas dasar ASN yaitu terus meningkatkan pelayanan secara signifikan dalam hal ini

peningkatan layanan data penataan ruang kawasan perbatasan untuk guna memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Implementasi strategi pengembangan kompetensi tim dan potensi diri yang dilakukan oleh project leader selama Laboratorium Kepemimpinan dalam memberdayakan stakeholder internal dan eksternal pada tahap Implementasi Proyek Perubahan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pertemuan dan diskusi yang dilakukan terhadap stakeholder internal maupun stakeholder eksternal untuk membahas tahapan yang perlu dilakukan dalam mensukseskan Implementasi Proyek Perubahan.
- b. Membuat inovasi yang memudahkan pelanggan atau pasien untuk dapat memeriksakan kesehatannya tanpa harus ke rumah sakit, dengan kata lain membuat rumah sakit di dalam rumah.

Melakukan kegiatan sosialisasi kepada stakeholder terkait sehingga mereka dapat mengetahui, mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi proyek perubahan sesuai dengan kapasitasnya.

Pemanfaatan sumber daya organisasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proyek perubahan. Dengan tersedianya sumber daya organisasi, implementasi proyek perubahan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pemanfaatan sumber daya organisasi pada Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dalam rangka implementasi proyek perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya dengan etos kerja yang tinggi merupakan salah satu faktor kunci pendukung keberhasilan Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dalam mencapai target kinerja dalam pembangunan pada kawasan perbatasan. Peningkatan SDM Aparatur bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang profesional berwawasan luas mempunyai etos kerja yang tinggi, kualitas secara umum, peningkatan SDM aparatur BNPP serta pemerintah daerah untuk peningkatan pengaturan, peningkatan kemampuan dan keterampilan/memperbaiki kinerja, peningkatan

kesempatan kerja dan promosi, peningkatan pendapatan dan akhirnya peningkatan kesejahteraan.

- b. Sistem dan prosedur kerja yang memadai merupakan pedoman dalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatan sehingga memudahkan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan mengevaluasi pengendalian serta mampu memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar-standar pemerintahan.

### 3.4 Hasil Capaian Proyek Perubahan

Tabel 4. Hasil Capaian Proyek Perubahan

No	Kegiatan	Keterangan
Jangka Pendek Minggu I September s.d Minggu I Desember 2022		
1	<p><b>Target pencapaian kegiatan proyek perubahan dalam jangka pendek. Membangun tim efektif untuk berkerja sama dalam membuat terobosan Integrasi dan Optimalisasi Layanan Data Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Melalui Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (SI-PRKP).</b></p> <p>Dumilai dengan rapat koordinasi Dimulai dengan rapat koordinasi dengan para stakeholder, baik dengan, stakeholder internal, yaitu Perencana Ahli Madya, Perencana Ahli Muda, dan staf serta tenaga ahli di lingkungan Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan. Dalam kesempatan itu Project Leader menyampaikan tentang rencana proyek perubahan yang akan diterapkan pada Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan sebagai langkah alternatif atau terobosan dalam tata kelola pelayanan dan data pada Asdep PRKP melalui SI-PRKP.</p>	

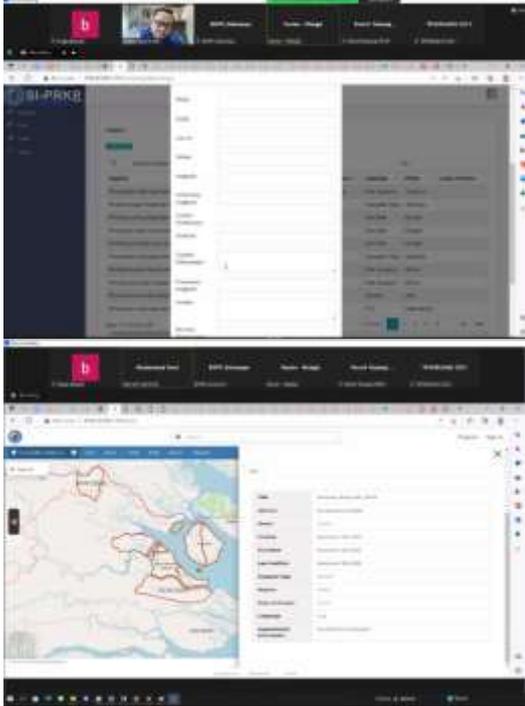
No	Kegiatan	Keterangan
	Selanjutnya untuk dapat mensukseskan proyek perubahan ini diusulkan untuk dibuatkan tim guna memudahkan koordinasi dalam penyusunan SI-PRKP.	
2	<p>Penyusunan dan pembagian tugas yang dituangkan dalam Surat Keputusan kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.</p> <p>Pembentukan tim efektif telah dilaksanakan melalui SK Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 35.04 – 294 Tahun 2022 tentang Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Integrasi dan Optimalisasi Layanan Data Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Melalui Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2022</p>	
3	<p>Target tahapan kegiatan ini yaitu berkoordinasi dengan K/L terkait mengenai tata ruang kawasan perbatasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan pembahasan mengenai tata ruang dengan kementerian dan lembaga terkait</li> <li>• Mensosialisasikan rencana pembuatan aplikasi SI-PRKP</li> </ul>	



No	Kegiatan	Keterangan
		
5	<p>Target tahapan kegiatan ini melakukan pembahasan Penyusunan Model Entity Relationship. Sebagai bahan masukan untuk pengintegrasian dan optimalisasi layanan data pada penataan ruang kawasan perbatasan.</p> <p>Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 dan menghasilkan beberapa poin :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Aksi dari mitra Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, BNPP terdiri dari Rencana Aksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rencana Aksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Rencana Aksi Badan Pusat Statistik.</li> <li>• Program dari Kementerian Aksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdapat sebanyak 6 kegiatan pada tahun 2022. Program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 145 kegiatan pada tahun 2022. Program dari Badan Pusat Statistik sebanyak 1 kegiatan pada tahun 2022.</li> <li>• Delineasi PKSNI didasarkan pada RDTR PKSNI, RTRW kabupaten/kota, RTRKPN, dan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi berbasis PKSNI.</li> </ul>	 <p><b>BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN</b>  <b>REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>ASISTEN DEPUTI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN</b>  <small>Jalan Sekeloa Selatan I No. 1, Jakarta Pusat, Telp. (021) 5233311, web: www.bnpp.go.id</small></p> <p><b>NOTA DINAS</b></p> <p>Sesuai</p> <p>YTI : Bapak PNS, Deputi Bidang Pengkajian Kawasan Perbatasan selaku Mentor  Dit : Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan selaku Project Leader  Mtl : Laporan Pembahasan di  Lampiran :  Tanggal : 29 Oktober 2022</p> <p>Sehubungan dengan adanya proses pembahasan untuk integrasi dan Optimalisasi Layanan Data Perbatasan Ruang Kawasan Perbatasan melalui Sistem Informasi Perbatasan Ruang Kawasan Perbatasan (SIPERP), telah dilakukan rapat pembahasan tentang pengujian data sistem berbasis informasi SIPERP dengan pokok – pokok laporan sebagai berikut:</p> <p>Dengan format, isi meliputi sebagai berikut hari Kamis, 26 Oktober 2022, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan Model Entity Relationship (MER) Sistem Informasi Perbatasan Ruang Kawasan Perbatasan (SIPERP) dengan pokok-pokok laporan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat dibuka oleh Bapak Muhammad Fikri, S.STP, M.Si selaku Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, dan dihadiri oleh, Bapak Ruzlan Suryadi, ST, M.Si dan PT, Wabandi Indonesia, JFu Pado Asong Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, dan Staff Pado Asong Penataan Ruang Kawasan Perbatasan.</li> <li>2. Bapak Muhammad Fikri, S.STP, M.Si selaku Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan memaparkan kegiatan penyusunan data model perancangan sistem SIPERP dan melakukan pembahasan draft model perancangan sistem SIPERP.</li> <li>3. Hal-hal yang berkenaan dalam rapat.</li> <li>4. Rencana Aksi dari mitra Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, BNPP terdiri dari Rencana Aksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rencana Aksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Rencana Aksi Badan Pusat Statistik.</li> <li>5. Program dari Kementerian Aksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Perbatasan Nasional terdapat sebanyak 6 kegiatan pada tahun 2022. Program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 145 kegiatan pada tahun 2022. Program dari Badan Pusat Statistik sebanyak 1 kegiatan pada tahun 2022.</li> <li>6. PKSNI yang menjadi fokus pada pengelompokan RW/KP tahun 2020-2024 yaitu 16 (enam belas) lokasi; PKSN di dalam koridor perbatasan dan pemukiman, yang terdiri atas 9 (sembilan) PKSN Darat, dan 7 (tujuh) PKSN Laut. Dimana enam diantaranya adalah Maja Project RPMM Tahun 2020-2024, dan 3 (tiga) PKSN di luar koridor perbatasan dan pemukiman, yang terdiri atas 1 (satu) PKSN Darat dan 2 (dua) PKSN Laut.</li> <li>7. Cakupan kecamatan yang masuk dalam wilayah PKSN ditetapkan melalui delineasi PKSN. Penetapan kecamatan tersebut menjadi bagian instrumen untuk pemertanian dan pengambilan tingkat keberhasilan pengembangan ekonomi wilayah.</li> <li>8. Delineasi PKSN didasarkan pada RDTR, PKSA, RTRW kabupaten/kota, RTRKPN, dan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi berbasis PKSA.</li> <li>9. Hasil delineasi PKSN digunakan: (a) sebagai salah satu instrumen, yaitu (a) data (data umum) instrumen yang merupakan lampiran dan (b) (sebagai) instrumen di luar lampiran yang ditetapkan pada periode Tahun 2020-2024.</li> <li>10. Dari 16 (delapan belas) PKSN di atas, 4 (empat) PKSN di antaranya ditetapkan sebagai proyek prioritas atau Maja Project meliputi: (1) PKSN Pakab Andak, (2) PKSN Maraukan, (3) PKSN Jitipura, (4) PKSN Maraukan, (5) PKSN Alindau, dan (6) PKSN Kariyatenan.</li> </ol> <p>Demikian hasil wawancara untuk menjadi perincian dan arahan Bapak, Terima Kasih dan diharapkan untuk menjadi perincian dan arahan Bapak, Terima Kasih !!</p>

No	Kegiatan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil delineasi PKS N diperoleh 46 (empat puluh enam) kecamatan, yaitu 36 (tiga puluh enam) kecamatan yang merupakan Lokpri dan 10 (sepuluh) kecamatan di luar Lokpri yang ditangani pada periode Tahun 2020-2024</li> </ul>	
6	<p>Target tahapan kegiatan ini melakukan pembahasan pembangunan satu data (Big Data). Sebagai bahan masukan untuk pengintegrasian dan optimalisasi layanan data pada penataan ruang kawasan perbatasan.</p> <p>Kegiatan dilaksanakan pada hari Jum`at, 4 November 2022 dan menghasilkan beberapa poin : ada beberapa dokumen mengenai penataan ruang yang dapat di masukan dalam SI-PRKP sebagai acuan bagi masyarakat atau eksetenal dalam membuat perencanaan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Spasial – data pola ruang dan struktur ruang PKS N yang terdapat 16 buah. Untuk jangka pendek yang akan diprioritaskan untuk di input didalam SI-PRKP yaitu PKS N Paloh-Aruk dan PKS N Nunukan</li> <li>Pola ruang yang akan ditampilkan secara penuh dalam satu shape file pada masing-masing PKS N Paloh Aruk / PKS N Nunukan</li> <li>Struktur Ruang nantinya akan menampilkan satu shape file, pada jangka pendek akan di prioritaskan pada PKS N Paloh Aruk atau PKS N Nunukan;</li> <li>Indikasi program pada Rencana Induk PBWN-KP, sehingga dapat memudahkan melihat lokasi yang dengan menggunakan SI-PRKP; dan</li> <li>Delinasi PKS N untuk pemantauan dan pengukuran tingkat keberhasilan ekonomi.</li> </ul>	 <p><b>BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN</b> REPUBLIK INDONESIA ASISTEN DEPUTI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN Jalan Kelen Sirih Nomor 10, Jakarta Pusat, Telp. (021) 5243141, web://www.bnpb.go.id</p> <p><b>NOTA DINAS</b></p> <p>Nomor :</p> <p>Yth. : <input type="checkbox"/> Wakil PR, Deputy Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan selaku Mentor  <input type="checkbox"/> Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan selaku Project Leader  <input type="checkbox"/> Laporan Pembahasan SI-PRKP</p> <p>Lampiran : -  Tanggal : 4 November 2022</p> <p>Selubungan dengan adanya proyek pembenahan untuk integrasi dan Optimalisasi Layanan Data Penataan Ruang Kawasan Perbatasan melalui Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (SI-PRKP), telah dilakukan rapat pembahasan tentang pengisian data dalam Sistem Informasi PRKP dengan pokok – pokok laporan sebagai berikut :</p> <p>Dengan format, ich melaporkan bahwa hari Jumat, 4 November 2022, telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan penyimpanan satu data (Big Data) Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (SI-PRKP) dengan pokok-pokok laporan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat dibuka oleh Wakil Mahanawal PAIR, S.STP, M.Si, selaku Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, dan dihadiri oleh, Bapak Rinaldi Nuryadin, ST, M.Si dan PT, Widiyo Indonesia, JPU Pada Jalep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, dan Staff Pada Jalep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan</li> <li>Wakil Mahanawal PAIR, S.STP, M.Si, selaku Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan memaparkan kegiatan penyusunan draft model penancangan kolaborasi SI-PRKP dan melakukan pembahasan draft model penancangan database SI-PRKP.</li> <li>Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat: <ol style="list-style-type: none"> <li>Data spasial yang akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan adalah data pola ruang dan struktur ruang PKS N wilayah seluasnya, yang akan diprioritaskan dalam penginputan ke dalam aplikasi SI-PRKP adalah PKS N Paloh-Aruk dan PKS N Nunukan.</li> <li>Pola Ruang akan ditampilkan secara penuh dalam satu shape file pada masing-masing PKS N Paloh-Aruk dan PKS N Nunukan yang akan ditampikan di aplikasi SI-PRKP.</li> <li>Struktur Ruang akan ditampilkan secara penuh dalam satu shape file pada masing-masing PKS N Paloh-Aruk dan PKS N Nunukan yang akan ditampikan di aplikasi SI-PRKP.</li> </ol> </li> <li>Dari 18 (delapan belas) PKS N di atas, 6 (enam) PKS N di antaranya ditetapkan sebagai proyek prioritas atau Maju Projei meliputi: (1) PKS N Paloh Aruk; (2) PKS N Nunukan; (3) PKS N Japraya; (4) PKS N Marauke; (5) PKS N Atambua; dan (6) PKS N Nefamama.</li> <li>Peraturan Presiden nomor 118 tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan menjelaskan PRGM yang menjadi fokus pada pengelohan SI-PRKP tahun 2020-2024 yaitu 1E (enam belas) PKS N di dalam koridor pemukiman dan pemantauan, yang terdiri atas 8 (delapan) PKS N Darat, dan 7 (tujuh) PKS N Laut (termasuk enam diantaranya adalah Major Project RPMMN Tahun 2020-2024), dan 2 (dua) PKS N di luar koridor pemukiman dan pemantauan, yang terdiri atas 1 (satu) PKS N Darat dan 1 (satu) PKS N Laut.</li> <li>Indikasi Program yang terdapat dalam Rencana Induk SI-PRKP akan dilaksanakan ke dalam database aplikasi SI-PRKP, sehingga akan terlihat lokasi kombrat dan pelaksanaan renek: berakibat.</li> <li>Delinasi merupakan penggambaran dari data lapangan yang akan diintegrasikan ke database wilayah dalam peta.</li> <li>Delinasi PKS N adalah pemetaan kecamatan yang masuk ke dalam wilayah PKS N untuk pemantauan dan pengeloran tingkat keberhasilan ekonomi wilayah, Delinasi PKS N dibakukan pada ROR PKS N, WTAH Kabupaten/Kota, WTAZPH, dan Monev/Persepan</li> </ol>

No	Kegiatan	Keterangan
		
5	<p>Target tahapan kegiatan ini yaitu terbuatnya aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan</p> <p>Melakukan sosialisasi kepada stakeholder di lingkup Settag BNPP tentang aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (SI-PRKP)</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 14 November 2022, acara sosialisasi ini turut diundang seluruh Perencana Ahli Madya pada settag Lingkungan BNPP, dan tenaga Ahli Biro Perencanaan dan Kerjasama. Berikut laporan kegiatan sosialisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk diperhatikan ketersediaan data antar lembaga sehingga sistem informasi dapat sinkron dengan sistem yang sudah ada</li> <li>• Pada tahap jangka panjang diperlukan koordinasi lebih lanjut terkait pertukaran API/Server GIS online oleh Biro Perencana dan Kerjasama</li> <li>• Pada jangka menengah dan panjang perlu pencermatan dalam menjaring renaksi K/L sehingga aplikasi yang ada di BNPP tidak tumpang tindih</li> <li>• Diperlukan koordinasi kembali terkait izin pembuatan sistem baru dengan melihat regulasi SPBE</li> </ul>	 

No	Kegiatan	Keterangan
6	<p>Pada tahapan ini Project Leader memberikan pengarahan sebagai tindak lanjut atas rapat sebelumnya untuk menyempurnakan aplikasi SI-PRKP, sebagai finalisasi SI-PRKP dalam jangka pendek dan langkah-langkah persiapan dalam kegiatan jangka menengah dan jangka panjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembaharuan interface aplikasi membutuhkan waktu untuk mengubahnya karena akan mengubah semua sistem sehingga baru dapat terlaksana di jangka menengah.</li> <li>• Pada jangka waktu pendek wilayah yang tersedia yaitu PKSN Paloh Aruk dan PKSN Nunukan, hal ini didukung oleh lengkapnya data pada kedua PKSN itu.</li> <li>• Memperhatikan kembali data rencana aksi</li> </ul>	
7	<p>Pada kegiatan ini, Project Leader membuat pelaporan atas implementasi proyek perubahan yang sudah dilaksanakan selama ini.</p> <p>Kegiatan ini sebagai evaluasi tahapan jangka pendek dalam proyek perubahan yang akan terus disempurnakan dalam tahapan jangka menengah dan panjang nantinya. Selain itu lapoan ini juga sebagai syarat kelulusan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebagai laboratorium pemebelajaran project leader.</p>	

### 3.5 Keberlanjutan Proyek Perubahan

Keberlanjutan proyek perubahan ini sangat penting karena tidak hanya memiliki manfaat positif bagi Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pelayanan data bagi stakeholder Kementerian mitra maupun Organisasi Perangkat Daerah kawasan perbatasan, keberlanjutan proyek perubahan juga mengindikasikan bahwa proyek perubahan ini tidak hanya menjadi sebuah syarat kelulusan semata, proper ini akan ditindaklanjuti dengan menetapkan Kebijakan Layanan Aplikasi SI PRKP dalam meningkatkan koordinasi untuk pengambilan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan negara.

#### 3.5.1 Dukungan Mentor untuk Keberlanjutan Proyek Perubahan

Faktor penting yang mendorong keberlanjutan proyek perubahan adalah dukungan mentor. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Project Leader dalam memperoleh dukungan mentor adalah dengan melakukan pertemuan dan diskusi untuk membahas implementasi proyek perubahan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, menyampaikan maksud, tujuan, manfaat, output yang dihasilkan serta dampak dari proyek perubahan sehingga memperoleh masukan dan arahan kebijakan strategis yang sangat penting untuk keberlanjutan proyek perubahan ini.



Gambar 12 Pemberian Masukan dari Mentor kepada Project Leader

### 3.5.2 Rencana Implementasi Jangka Menengah dan Panjang

Implementasi Proyek Perubahan yang memfokuskan pada tahapan jangka pendek ini akan berlanjut setelah selesainya PKN II, sebagai realisasi dari tahapan jangka menengah dan panjang. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan jangka pendek akan dilanjutkan pada jangka menengah dan panjang yaitu penayangan informasi Proyek Perubahan pada online maupun offline, Email, Spanduk, Pamphlet Grup Whatshapp, Instagram, serta melalui website dan media sosial. Hal ini diharapkan dapat menjadi wadah sosialisasi serta meningkatkan pelayanan Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan kepada stakeholder mitra Asdep PRKP dan Organisasi Perangkat Daerah serta Masyarakat dalam meningkatkan literasi dan pengawasan terhadap pemabangunan di kawasan perbatasan neagra.

Selain itu, proyek perubahan ini juga masih perlu pandangan dan masukan positif guna keberlanjutan dan keberhasilan proyek perubahan. Implementasi proyek perubahan “Integrasi dan Optimalisasi Layanan Data Penataan Ruang kawasan Perbatasan melalui Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (SI PRKP)” tahapan jangka menengah dan pajang yang akan direalisasikan sesuai dengan milestone yang telah ditetapkan dalam Rencana Proyek Perubahan (RPP) diuraikan dibawah ino

#### 3.5.2.1 Jangka Menengah (Desember 2022 – Mei 2023)

1. Pelaksanaan dan pengoperasioan aplikasi SI PRKP akan diresmikan dengan keluarnya Surat Keputusan SI PRKP oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Adapun saat ini Surat Keputusan sudah berproses di bagian hukum yang ditargetkan akan keluar pada bulan Desember.
2. Pelaksanaan SI PRKP akan terus menerima masukan dari berbagai komponen terkait dengan tata ruang yang membutuhkan layanan SI PRKP. Rencana akan terus dilakukan.
3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan implementasi proyek perubahan jangka menengah. Rencana akan dilaksanakan pada Bulan Februari sampai dengan Mei 2023.

#### 3.5.2.2 Jangka Panjang (Juni 2023 – Desember 2024)

1. Melaksanakan Pelayanan aplikasi SI PRKP secara penuh sebagai alat layanan data dalam pengambilan kebijakan. dan semua penyakit yang membutuhkan layanan tersebut. Rencana akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Desember 2024.
2. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Implementasi tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan. Rencana akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Desember 2024.

### **3.6 Lesson Learnt**

Pelaksanaan Proyek Perubahan pada jangka pendek merupakan proses pembelajaran (Lesson Learned) bagi peserta terkait kepemimpinan strategis dan manajemen strategis. Dari sisi kepemimpinan strategis, pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II ini telah menyumbangkan pemahaman bahwa Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan harus menjadi organisasi yang adaptif dan agile terhadap perkembangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui kepemimpinan yang berani mengambil keputusan guna melaksanakan inovasi/terobosan serta mampu bersifat dinamis dan beradaptasi dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi.

Kepemimpinan strategis tersebut dapat berhasil dilakukan melalui pelaksanaan manajemen strategis yaitu dengan melakukan dialog strategis serta pemasaran sektor publik yang tepat dan kreatif. Implementasi Proyek Perubahan ini dapat memberikan pengalaman dalam mengusulkan kegiatan yang berifat baru dan inovatif dimana keberhasilan pelaksanaannya tergantung pada keterlibatan stakeholders. Melalui pemetaan stakeholders termasuk menentukan stakeholders kunci untuk kegiatan jangka pendek merupakan langkah penting dan strategis dalam kegiatan ini. Selanjutnya menyiapkan informasi awal serta melakukan pembahasan yang terbuka dengan stakeholders yang merupakan dasar bagi keberlanjutan Implementasi Proyek Perubahan.

Masukan Coach dalam pelaksanaan Proyek Perubahan berkontribusi penting pada pemahaman dasar serta detail dari implementasi proyek perubahan untuk keberlanjutan Proyek Perubahan. Selanjutnya arahan, masukan dan persetujuan Mentor menjadi landasan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan Proyek Perubahan. Selain itu Tim Efektif melaksanakan peran yang penting dalam keberlangsungan proyek perubahan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

1. Implementasi Proyek Perubahan tahapan jangka pendek telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan yaitu 1) Terbentuknya Tim Efektif Proyek Perubahan; 2) telah terbentuk aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang kawasan Perbatasan (SI-PRKP); 3) Terbentuknya Kelompok Layanan SI PRKP.
2. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam pembentukan Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (SI RPKP) ini adalah integrasi dan optimalisasi layanan data penataan ruang kawasan perbatasan secara penuh untuk meningkatkan literasi masyarakat dan pembuat kebijakan pada kawasan perbatasan melalui penerapan teknologi;
3. Pembentukan aplikasi SI PRKP diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelayanan penataan ruang di kawasan perbatasan.

### **4.2 Rekomendasi**

1. Untuk keberlanjutan proyek perubahan maka tahapan jangka menengah dan jangka panjang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan SI PRKP ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
2. Agar implementasi jangka menengah dan jangka panjang dapat berjalan dengan baik, maka strategi marketing yang akan dilaksanakan untuk meyakinkan para stakeholders yaitu dengan koordinasi, konsultasi dan komunikasi efektif (dialog strategis, pertemuan dan diskusi).
3. Kementerian mitra Asdep PRKP dan Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat terus mendukung serta memfasilitasi proyek perubahan ini melalui kebijakan strategis dan penganggaran program/kegiatan guna keberlanjutan proyek perubahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Intruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government
- Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2022 tentang Tugas Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang
- Kusmayadi, E. (2022). Pengantar Manajemen Data. In *Pengantar Manajemen* (hal. 1–42). <https://doi.org/10.52931/t4b15/2022>
- Suryanto, Adi. 2018. “Mendorong Kebijakan Publik Berkualitas Berbasis Data & Fakta”. Disampaikan dalam Talkshow Perjalanan Analis Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Launching Modul Pelatihan Analis Kebijakan,” di Gedung A Lantai II, Kantor LAN RI
- The Cabinet Office. (2017). *Better information for better government*. (January). Diambil dari <https://www.gov.uk/government/publications/better-information-for-better-government>
- Tri Widodo W. Utomo, 2019. Inovasi Harga Mati, Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara, Ed.1, Cet.4, Rajawali Pers.

**LAMPIRAN**

# SK Tim Kerja Integrasi dan Optimalisasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

**BADAN KEMENTERIAN PERENCANAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN BADAN KEMENTERIAN PERENCANAAN NASIONAL  
NOMOR 35/KA-014/2019/2019**  
**TENTANG:**  
**TIM KERJA PENYUSUNAN PERENCANAAN TERPADU DAN  
OPTIMALISASI LAYANAN DATA PENATAAN RUANG KAWASAN  
PERBATASAN DENGAN MELALUI SISTEM INFORMASI PERBATASAN  
RUANG KAWASAN PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2020**  
**BADAN KEMENTERIAN PERENCANAAN NASIONAL**

**Membina:**

- 1. a. Untuk aspek koordinasi kegiatan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya meliputi data penataan ruang kawasan perbatasan negara, perlu dibentuk Tim Kerja penyusunan rencana penataan ruang, kegiatan dan optimalisasi layanan dan optimalisasi ruang kawasan perbatasan negara melalui sistem informasi perbatasan ruang kawasan perbatasan.
- 2. Untuk terbentuknya perencanaan pembangunan terpadu dalam rangka a. pada tingkat Kabupaten/Kota sebagai Badan Nasional Pengolah Perencanaan tentang Tim Kerja Penyusunan Proyek Perbaikan Integrasi dan Optimalisasi Layanan Data Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara Melalui Sistem Informasi Perbatasan Ruang Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2020.

**Mengingat:**

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Rencana Ruang (Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16), Tanggal 16 Februari 2007 Nomor 4725.
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142).
- 3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19), Tanggal 16 Februari 2010 Nomor 6125.
- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengolah Perencanaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun

-3-

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengolah Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

5. Peraturan Badan Nasional Pengolah Perencanaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengolah Perencanaan Serta Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 80.

6. Peraturan Badan Nasional Pengolah Perencanaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengolah Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91).

**MEMUTUSKAN:**

**Mengatakan:**

**KEDUA,**

- 1. Menetapkan Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Integrasi dan Optimalisasi Layanan Data Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara Melalui Sistem Informasi Perbatasan Ruang Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2020 yang anggotanya terdiri dengan Tim Kerja Proyek Perubahan Layanan Data Penataan Ruang Kawasan Perbatasan di PRRP, dengan susunan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KELUWA,**

- 1. Tim Kerja Proyek Perubahan Layanan Data Penataan Ruang Kawasan Perbatasan di PRRP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
  - a. Program, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan.
  - b. Kerja, mempunyai tugas:
    - 1. menanggapi rencana kegiatan;
    - 2. menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan; dan
    - 3. melaporkan hasil pelaksanaan model Web di PRRP.
  - c. Revisi, mempunyai tugas:
    - 1. memantau dan melaporkan pelaksanaan kegiatan;
    - 2. melakukan kerja sama/koordinasi kegiatan; dan
    - 3. menanggapi bahan laporan dari laporan kegiatan.
  - d. Kelompok kerja Indonesia relasi dan penyelenggaraan kegiatan, mempunyai tugas:
    - 1. melakukan koordinasi kegiatan dan menilai pelaksanaan tata ruang kawasan perbatasan;
    - 2. melakukan analisis hasil identifikasi potensi dan masalah pengelompokan kawasan perbatasan negara; dan
    - 3. melaporkan hasil analisis identifikasi potensi dan masalah pengelompokan kawasan perbatasan kepada BPPN.

-3-

- 1. Kelompok kerja penyusunan model web relational database, mempunyai tugas:
  - 1. menyusun model penataan ruang kawasan perbatasan relasional berbasis penataan ruang kawasan perbatasan;
  - 2. melakukan penataan model penataan ruang kawasan perbatasan;
  - 3. melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait;
  - 4. melakukan analisis model penataan ruang informasi penataan ruang kawasan perbatasan; dan
  - 5. melaporkan hasil penyusunan model penataan ruang kawasan perbatasan kepada BPPN.
- 2. Kelompok kerja publikasi dan sosialisasi, mempunyai tugas:
  - 1. menanggapi dan melaksanakan kegiatan sosialisasi; dan
  - 2. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan publikasi, dan media.

**KETIGA,**

- 1. Tim Kerja Proyek Perubahan Layanan Data Penataan Ruang Kawasan Perbatasan di PRRP akan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengolah Perencanaan melalui Sekretaris Badan Nasional Pengolah Perencanaan.

**KEEMPAT,**

- 1. Tim Kerja Proyek Perubahan Layanan Data Penataan Ruang Kawasan Perbatasan di PRRP akan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dibantu dari unsur teknis, administratif, dan modernisasi.

**KELIMA,**

- 1. Tim Kerja Proyek Perubahan Layanan Data Penataan Ruang Kawasan Perbatasan di PRRP akan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, selama 3 (tiga) bulan.

-4-

**KETUHA,**

- 1. Anggotanya ke dalam tim kerja pada tingkat Kabupaten.

Disusun di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2019

**RA. EDI MUDA BAHAN KEMENTERIAN PERENCANAAN NASIONAL**  
  
**W. BERTAWAN SAGUNG**

**Terdapat 7 (tujuh) orang:**

- 1. Deputi Sekretaris Dalam Negeri sebagai Kepala BPPN, sebagai koordinator;
- 2. Deputi Bidang Pengelompokan Perencanaan Perencanaan;
- 3. Deputi Bidang Pengelompokan Perencanaan Perencanaan;
- 4. Asisten Deputi Bidang Perencanaan Perencanaan (Kantor, Perencanaan Tetap BPPN);
- 5. Asisten Deputi Perencanaan Tetap Ruang Kawasan Perbatasan, Sekretariat Tetap BPPN;
- 6. Asisten Deputi Perencanaan Kawasan Perbatasan dan Sekretariat Tetap BPPN;
- 7. Yang bersangkutan ini.



# Rapat Koordinasi Integrasi dan Optimalisasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
KUSUR DEPURT PENYATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN  
Jalan Kuning 508 Nomor 23, Jakarta Pusat, Telp. (021) 5212121, web://www.bnpk.go.id

**Surat** : /BB.07/Aspek/DA/0/2022  
**Tempat** : Jakarta, November 2022  
**Lampiran** : 1 (satu) lembar  
**Tgl** : Undangan

Yth. Para Kepala/Deputi Kepala  
di Tempat

Selamat siang Bapak/Pemimpin/Pengelola/Deputi di Ruang Kerja Perbatasan  
Integrasi dan Optimalisasi Layanan Tata Perencanaan Ruang Kawasan Perbatasan Monev  
Sistem Informasi Perencanaan Ruang Kawasan Perbatasan (SI-PRKP), maka pada undangan  
saya mengundang kehadiran Anda (SI-PRKP).

Selanjutnya dengan ini mengundang kehadiran Anda pada Rapat Koordinasi  
Integrasi dan Optimalisasi Layanan Tata Perencanaan Ruang Kawasan Perbatasan Monev  
Sistem Informasi Perencanaan Ruang Kawasan Perbatasan (SI-PRKP) yang akan dilaksanakan  
pada:

**Tgl/Tanggal** : 14/11/2022  
**Waktu** : 09.00 WIB s.d. selesai  
**Tempat** : Ruang Rapat Utama Lantai II, Kantor BNPK, Jl. Kuning 508 Nomor 23,  
Jakarta Pusat  
**Zoom ID** : 526 186 1138  
**Passcode** : 889888

Rapat dilaksanakan dengan cara pertemuan pada protokol kesehatan sesuai  
peraturan COVID-19.

Demiikian diucapkan, atas kehadiran dan keterlibatannya diucapkan terima kasih.

**KUSUR DEPURT**  
**PENYATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN**

*Muhammad Farel, S.T.P., M.Si*  
**MUHAMMAD FAREL, S.T.P., M.Si**

Terlampir Yth.

1. Pdt. Deputi Bidang Pengendalian Perencanaan Perbatasan, sebagai laporan, dan
2. Salinan BPPP, sebagai bahan.

**LAMPIRAN SURAT ASPEK PRKP BNPK**  
**NOMOR** : /BB.07/Aspek/DA/0/2022  
**TANGGAL** : November 2022

**DAPILAN PERBATAN**  
**RAPAT KOORDINASI INTEGRASI DAN OPTIMALISASI LAYANAN DATA**  
**PERENCANAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN**  
**MONEV SISTEM INFORMASI PENYATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN (SI-PRKP)**  
**DIKAT, 4 NOVEMBER 2022**

1. Dn. Fenderson Kabbuloh, M.Si, Perencana ARI Mada pada Aspek PRKP, BNPK;
2. Heris Fadhil, S.T., M.T, Perencana ARI Mada pada Aspek PRKP, BNPK;
3. Heriyana, S.T.P., M.M, Perencana ARI Mada pada Aspek PRKP, BNPK;
4. Suliana, S.T, Perencana ARI Mada pada Aspek PRKP, BNPK;
5. Eri Pal Adah, S.Sos, Perencana ARI Mada pada Aspek PRKP, BNPK;
6. Fiska Kusniati, S.T.P., M.Si, Perencana ARI Mada pada Aspek PRKP, BNPK;
7. Jaska Chika Piter, S.T.P, Pengabdian Sosial, SPP pada Aspek PRKP, BNPK;
8. Tri Mula Harasmita Sari, S.T.P, Perencana Pada Aspek PRKP, BNPK;
9. Dadi Dadi Saraningrat, S.M, Perencana-Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Aspek PRKP, BNPK;
10. Akher Sh Peribhatti, S.E., Perencana-Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Aspek PRKP, BNPK;
11. Rendi Rendi Taya, S.E, Analis Pengembangan Wilayah pada Aspek PRKP, BNPK;
12. Alifan Yulia Sari, S.Sos, Analis Tata Ruang pada Aspek PRKP, BNPK;
13. Muhammad Farel Fawaid, A.Md, Pengabdian Sosial dan Perencanaan Program dan Anggaran pada Aspek PRKP, BNPK;
14. May Dene Setiwi Dina, S.N., Staff Pada Aspek PRKP, BNPK;
15. Fiki Rohmadani, S.T., Staff Pada Aspek PRKP, BNPK;
16. Arum Santiahyani, S.Kom, Staff Pada Aspek PRKP, BNPK;
17. Janglim Adi Wilana, S.P M.Si, Staff Pada Aspek PRKP, BNPK;
18. Fikriah Alamsyah, S.P M. Tenaga ARI pada Aspek PRKP, BNPK;
19. Sofya Mega Amalia Putri, S.Ah, Tenaga ARI pada Aspek PRKP, BNPK;
20. Magistra Santiana, A.Md, Staff Pada Aspek PR, BNPK;
21. Rendi Nurroddin, ST, M.Si, PT, Widyaiswara dan
22. Sulastri, S.T.PT, Widyaiswara.

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
KUSUR DEPURT PENYATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN  
Jalan Kuning 508 Nomor 23, Jakarta Pusat, Telp. (021) 5212121, web://www.bnpk.go.id

**NOTA DINAS**

**Surat**

Yth. : Kepala Pdt. Deputi Bidang Pengendalian Perencanaan Perbatasan sebagai Menteri dan  
KUSUR DEPURT Perencanaan Ruang Kawasan Perbatasan sebagai Kepala Departemen dan  
Layanan Perencanaan RI

**Tempat** : -  
**Tanggal** : 09 Oktober 2022

Selanjutnya dengan ini mengundang kehadiran Anda untuk menghadiri rapat koordinasi  
Layanan Data Perencanaan Ruang Kawasan Perbatasan melalui sistem informasi Perencanaan  
Ruang Kawasan Perbatasan (SI-PRKP), akan dilaksanakan rapat koordinasi tentang pengisian  
data sistem informasi PRKP dengan agenda - agenda sebagai berikut :

**Tempat** : BNP, dan dilaksanakan selama hari Rabu, 23 Oktober 2022, akan dilaksanakan  
kegiatan koordinasi online dan menggunakan aplikasi Perencanaan Ruang Kawasan  
Perbatasan (SI-PRKP) dengan protokol kesehatan sebagai berikut.

1. Rapat dibuka oleh Kepala Muhammad Farel, S.T.P., M.Si, selaku Aduktur Deputi Perencanaan Ruang Kawasan Perbatasan, dan dihadiri oleh Kepala Rendi Nurroddin, ST, M.Si dan PT, Widyaiswara, dan Staff Aspek Perencanaan Ruang Kawasan Perbatasan, dan Staff Pada Aspek-Perencanaan Ruang Kawasan Perbatasan
2. Kepala Pdt. Muhammad Farel, S.T.P., M.Si membuka kegiatan Deputi Perencanaan Ruang Kawasan Perbatasan menggunakan aplikasi perencana ruang kawasan perbatasan berdasarkan undang-undang undang dan standar kerangka kerangka.
3. Materi yang berkaitan dengan rapat.
4. Mengingat nomor 24 tahun 2007 tentang Perencanaan Ruang yang merupakan dasar atau acuan utama mengenai perbatasan ruang yang akan diwujudkan sebagai informasi, termasuk di wilayah kawasan Perbatasan negara. Perencanaan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
5. Mengingat nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah yang merupakan ketentuan tentang kawasan Perbatasan, yaitu wilayah dari Wilayah Negara yang berbatasan pada darat dengan negara lain, wilayah Indonesia dengan negara lain, antara lain Selat, Wilayah Negara di darat, kawasan Perbatasan berdasar di kerangka. Sistem geografis adalah wilayah negara dan kawasan Perbatasan pada tingkat awal dan dapat dibatasi Sistem Perencanaan nasional dan tingkat tingkat daerah.
6. Perencanaan Ruang Kawasan Perbatasan Angkara (terutama dalam Perencanaan Perbatasan) yang terdiri dari 4 yaitu, Perencanaan Perbatasan nomor 179 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Angkara di Provinsi Nusa Tenggara Timur; Perencanaan Perbatasan nomor 31 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Angkara di Kalimantan; Perencanaan Perbatasan nomor 30 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Angkara di Provinsi Papua; Perencanaan Perbatasan nomor 30 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Angkara di Provinsi Maluku; Perencanaan Perbatasan nomor 34 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Angkara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat; Perencanaan Perbatasan nomor 34 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Angkara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur; Perencanaan Perbatasan nomor 49 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Angkara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara; Perencanaan Perbatasan nomor 43 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Angkara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
7. Mengingat Perencanaan Perbatasan tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan terdiri dari Undang-Undang dan lampiran, Lampiran terdiri dari Peta Kawasan Perbatasan Ruang, Peta Kawasan Perbatasan, dan lainnya.

# Rapat Tindak Lanjut Koordinasi Integrasi dan Optimalisasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN

Jl. Raya Terpadu No. 11, Gedung Ruang Kerja, Jalan Terpadu No. 11, 11010 Jakarta Selatan, DKI Jakarta

**Surat** : 01/01/2022  
**Angka** : 11/11/2022  
**Tempat** : Jakarta  
**Tgl** : 11 November 2022

**Yth. Para Utusan** dalam pertemuan di tempat.

Demi tercapainya koordinasi dan integrasi data dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (SI-PKAP) yang mencakup aspek teknis dan lainnya di era digital di berbagai pemerintahan tingkat informasi dan komunikasi, maka perlu dilakukan rapat koordinasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

Sehubungan dengan hal tersebut, diwajibkan kehadiran pada Rapat Tindak Lanjut Integrasi dan Optimalisasi Layanan Data Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Melalui Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (SI-PKAP) yang akan dilaksanakan pada:

**Hari/Tanggal** : Selasa, 15 November 2022  
**Waktu** : 09.00 s.d. 12.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat Lantai 11, Gedung RKP, Jl. Raya Terpadu No. 11, Jakarta Selatan  
**Acara** : 1. Pembukaan  
 2. Laporan  
 3. Penutup

Pada rapat koordinasi mengenai hal-hal tersebut pada pokoknya berkaitan dengan integrasi dan optimalisasi layanan data penataan ruang kawasan perbatasan.

**DR. DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN POTENSI  
KAWASAN PERBATASAN**

  
**Dr. Rully M. Satrio, S.T., M.Hum**

Terima kasih,  
 Sekretaris BNP, sebagai laporan

**LAMPYAN SURAT DEPUTI  
BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN  
PERBATASAN**  
**KOMOR** : 1/17/2022/01/01/2022  
**TANGGAL** : 11 November 2022

**DAFTAR PESERTA**  
**RAKAT TINDAK LANJUT INTEGRASI DAN OPTIMALISASI LAYANAN DATA  
PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN  
MELALUI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN (SI-PKAP)**  
 SELASA, 15 NOVEMBER 2022

1. Perencanaan Ahli Madya Pado Adang Pengawasan Badan Negara Wilayah Darat
2. Perencanaan Ahli Madya pada Bidang Pengawasan Lintas Badan Negara
3. Perencanaan Ahli Madya pada Bidang Pengawasan Badan Negara Wilayah Laut dan Udara
4. Perencanaan Ahli Madya pada Bidang Perencanaan Kawasan Perbatasan Darat
5. Perencanaan Ahli Madya pada Bidang Perencanaan Ruang Kawasan Perbatasan
6. Perencanaan Ahli Madya pada Bidang Perencanaan Kawasan Perbatasan Laut
7. Perencanaan Ahli Madya pada Bidang Infrastruktur Darat
8. Perencanaan Ahli Madya pada Bidang Infrastruktur Kelautan dan Rantai
9. Perencanaan Ahli Madya pada Bidang Infrastruktur Perencanaan
10. Perencanaan Ahli Madya pada Bidang Perencanaan dan Kelautan
11. Zulfah Arwani, S.P., M.E. Perencanaan Ahli Madya pada Bidang Perencanaan dan Kelautan
12. Maghawa Satrio, A.M. Staff pada Bidang Perencanaan dan Kelautan
13. Afi Setya Pratomo, S.Kom. Tenaga Ahli pada Bidang Perencanaan dan Kelautan
14. Fito Darmawijaya, S.Kom. Tenaga Ahli pada Bidang Perencanaan dan Kelautan
15. Erwin H. Hidayat, S.Kom. Tenaga Ahli pada Bidang Perencanaan dan Kelautan
16. Fari Rho Pratomo, S.Kom. Tenaga Ahli pada Bidang Perencanaan dan Kelautan
17. Hudaib Hidayat, S.T., M.Si. PT. Rangka Industri dan
18. Setiwo, S.T. PT. Rangka Industri dan

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN**  
 Jl. Raya Terpadu No. 11, Gedung Ruang Kerja, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

**Surat** : 01/01/2022  
**Angka** : 11/11/2022  
**Tempat** : Jakarta  
**Tgl** : 11 November 2022

**Yth.** : 1. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan selaku Menteri  
 2. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan selaku Project Leader  
 3. Laporan Pembekalan SI-PKAP  
 4. Laporan

**Tanggal** : 11 November 2022

Sehubungan dengan adanya proyek perbaikan sistem integrasi dan optimalisasi Layanan Data Kawasan Perbatasan melalui Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (SI-PKAP), telah dilakukan rapat koordinasi tentang pengujian data dalam Sistem Informasi PKAP dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Dengan format, ini merupakan bahan dari rapat, 4 November 2022, telah dilaksanakan kegiatan pendahuluan pengujian data yang akan dilakukan melalui Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (SI-PKAP) dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Rapat dibuka oleh Kepala Mubandah Fandi, S.TP, M.Si, selaku Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan, dan dihadiri oleh, Deputi Bidang Perbatasan, ST, M.Si dan PT, sekretaris Indonesia, PU Pado Adang Perencanaan Ruang Kawasan Perbatasan, dan Staf Pado Adang Perencanaan Ruang Kawasan Perbatasan
2. Kepala Mubandah Fandi, S.TP, M.Si, selaku Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan memaparkan kegiatan penyusunan draft model pengujian data SI-PKAP dan melakukan pembahasan draft model pengujian data SI-PKAP
3. Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat.
4. Data spatial yang akan dimasukkan ke dalam sistem informasi penataan ruang kawasan perbatasan adalah data yang telah terintegrasi dengan PKAP, PKAP terintegrasi dengan SI, yang akan dipertimbangkan dalam pengujian ke dalam aplikasi SI-PKAP adalah: PKAP Pado Adang Perbatasan
5. Mula yang akan ditampilkan secara penuh dalam satu shape file pada masing-masing PKAP Pado Adang dan PKAP Kawasan yang akan ditampilkan di aplikasi SI-PKAP
6. Struktur ruang akan ditampilkan secara penuh dalam satu shape file pada masing-masing PKAP Pado Adang dan PKAP Kawasan yang akan ditampilkan di aplikasi SI-PKAP
7. Data SI (ditinjau dari) PKAP di atas, 9 (sembilan) PKAP di antaranya ditetapkan sebagai proyek prioritas atau Major Project meliputi: (1) PKAP Pado Adang, (2) PKAP Kawasan, (3) PKAP Laporan, (4) PKAP Monev, (5) PKAP Monev, dan (6) PKAP Kefasihan
8. Peraturan Presiden nomor 118 tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Badan Usaha Negara dan Kawasan Perbatasan menetapkan PKAP yang menjadi fokus pada pengembangan Badan Usaha Negara (BUN) pada tahun 2022-2024 yang akan dilakukan di dalam lingkup pengembangan dan pemertanian, yang terdiri atas 0 (nol) PKAP Darat, dan 7 (tujuh) PKAP Laut (termasuk dalam daftar prioritas untuk Major Project BPNB Tahun 2020-2024), dan 3 (tiga) PKAP di luar lingkup pengembangan dan pemertanian, yang terdiri atas 1 (satu) PKAP Darat dan 2 (dua) PKAP Laut
9. Informasi Program yang terdapat dalam Rencana Induk BUN 07 akan dimasukkan ke dalam database aplikasi SI-PKAP, sehingga akan terikat dalam kondisi dan pelaksanaan reaktif terdapat.
10. Informasi mengenai pengembangan data data lapangan yang akan dibuat guna pelaksanaan aplikasi dalam peta
11. Dokumen PKAP akan ditetapkan ke dalam sistem yang sesuai ke dalam aplikasi PKAP untuk pemertanian dan pengujian tingkat keberhasilan ekonomi wilayah. Informasi PKAP akan dimasukkan pada PKAP PKAP, BUN Kabupaten, BUN, BUN, dan Monev Persepsi

## Flyer SI-PRKP

# SI-PRKP 2022

## RANCANGAN PROYEK PERUBAHA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

**Judul: Integrasi dan Optimalisasi Layanan  
Data Penataan Ruang Kawasan Perbatasan  
Melalui Sistem Informasi Penataan Ruang  
Kawasan Perbatasan (SI-PRKP)**

**Latar Belakang:**

- Pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Perlunya sinkronisasi kebijakan satu data yang terintegrasi

**IDENTIFIKASI MASALAH:**

Berdasarkan hasil analisis penapisan pada identifikasi isu menggunakan metode APKL maka isu yang dipilih yaitu "Belum adanya layanan integrasi data tata ruang yang efektif dan efisien" yang menjadi Core isu terpilih untuk ditindak lanjut.

**ANALISIS PRIORITAS SOLUSI:**

Setelah dilakuk analisis prioritas solusi, maka prioritas untuk mengatasi isu strategis tersebut adalah dengan Membangun aplikasi yang terintegrasi dengan kegiatan penataan ruang, sehingga inovasi tersebut dapat bermanfaat bagi Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

@siprpk      tataruang2021@gmail.com

Page 1 of 8



# SI - PRKP 2022

## INTEGRASI DAN OPTIMALISASI LAYANAN DATA PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN MELALUI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN (SI-PRKP)

### OUTCOME:

meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan realtime. Sebagai alat konsolidasi dengan mitra kerja dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penataan ruang kawasan perbatasan

### Tahap Perubahan Rencana Strategis:

#### STRENGTH

- Kewenangan untuk mengelola kawasan perbatasan
- Mempunyai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada setiap perbatasan negara di Indonesia

#### OPPORTUNITIES

- Pemanfaatan tata ruang untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan
- Pusat pertumbuhan ekonomi baru pada kawasan perbatasan negara

#### ASPIRATIONS

- Pengintegrasian data penataan ruang kawasan perbatasan
- Pembuatan satu wadah untuk dapat menampung data dan informasi yang efektif

#### RESULT

- Aplikasi SI-PRKP sebagai dasar acuan dalam pengambilan kebijakan penataan ruang



SI - PREP



**RENCANA STRATEGI MARKETING**

**LATENTS**

**(PENGARUH BESAR KEPENTINGAN KECIL)**

- Biro Perencanaan dan Kerjasama
- Biro Keuangan, Umum dan Humas
- Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawalan

**PROMOTERS**

**(PENGARUH BESAR, KEPENTINGAN BESAR)**

- Kepala BNPP
- Sekretaris BNPP
- Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan

**APHATETICS**

**(PENGARUH KECIL KEPENTINGAN KECIL)**

- BPPD Provinsi
- BPPD Kota/Kabupaten
- OPD terkait

**DEFENDERS**

**(PENGARUH KECIL KEPENTINGAN BESAR)**

- Kementerian ATR/BPN
- Kementerian KLHK
- BPS

**Strategi Komunikasi/Mobilisasi**

**Stakeholder :**

- Terhadap **Promoters**, teknik komunikasi harus diperlakukan dengan respek, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, agar memperkuat posisinya (*key Players*);
- Terhadap **Latents**, harus diyakinkan pentingnya perubahan bagi peningkatan kinerja organisasi, melakukan komunikasi intens dan selalu memberikan informasi progres yang dilaksanakan (*keep satisfied*);
- Terhadap **Defenders**, harus selalu menjalin komunikasi dan selalu menyampaikan informasi, lakukan mentoring atau training agar mereka tetap terhubung dengan aksi perubahan (*keep informed*);
- Terhadap **Apathetics**, harus Tetap menjaga hubungan dan menghargai penentang, tetap sampaikan informasi tapi jangan terlalu sering agar tidak terkesan mengganggu, memberi semangat, memuji dan mengapresiasi setiap tindakan mereka dan secara terus (minimal effort).

**IDENTIFIKASI KENDALA DAN SOLUSI**

SDM yang menguasai/berlatar belakang IT terbatas



Kendala ketersediaan Dana



Keterbatasan waktu penyelesaian proyek



Data belum terintegrasi





# *SI - PRKP*

## 2022

1. Memberikan bimbingan teknis pada staf terutama untuk bidang layanan yang berbasis IT serta merekrut ahli IT ke tim proyek perubahan.
2. Mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia dalam DIPA Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
3. Mengoptimalkan waktu yang tersedia dalam menyelesaikan proyek perubahan, dengan menjadwalkan setiap kegiatan dengan baik.
4. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan stakeholder, baik internal maupun eksternal, terutama yang berkaitan dengan data penataan ruang kawasan perbatasan.

 @siprpk

 tataruang2021@gmail.com

Page 5 of 6



# INTEGRASI DAN OPTIMALISASI LAYANAN DATA PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN MELALUI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN (SI-PRKP)

## Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan



Dukungan dan komitmen penuh dari para stakeholders dalam penerapan sistem informasi penataan ruang kawasan perbatasan (SI-PRKP)



Terbangunnya aplikasi sistem informasi penataan ruang kawasan perbatasan dengan sosialisasi dengan mitra kementerian / lembaga



Kebijakan untuk mengimplementasikan sistem informasi penataan ruang kawasan perbatasan kepada seluruh pegawai

## RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI SEBAGAI

### TINDAKLANJUT DARI SELF ASSESMENT DIRI

#### 1. Integritas

- Mematuhi ketentuan yang berlaku
- Melaksanakan semua tugas dan arahan Pimpinan
- Berusaha menyelesaikan setiap persoalan
- Mengedepankan pelayanan terbaik

#### 2. Kerjasama

- Menjalin komunikasi koordinasi dan relasi
- Selalu berusaha memanfaatkan setiap peluang

#### 3. Mengelola perubahan

- Senantiasa berusaha mencari solusi dan terobosan
- Berusaha adaptif terhadap setiap perubahan
- Berusaha mengelola perubahan



 @siprpk

 tataruang2021@gmail.com

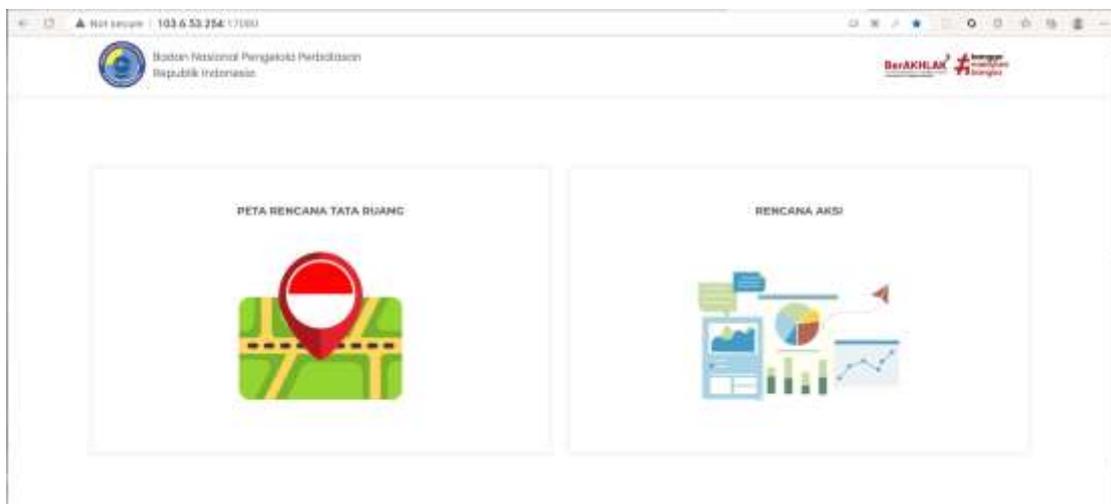
# **User Manual SI-PRKP**

## Bagian I: Landing Page

Website SI-PRKP dapat diakses pada URL <http://103.6.53.254:17080>. Tampilan awal dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Landing page tersebut merupakan pintu masuk pada 2 aplikasi lain: Data dan Rencana Aksi. Dari halaman landing page tadi, klik "Selengkapnya", maka akan tampil 2 pilihan seperti di bawa ini:



Pilih opsi “Peta Rencana Tata Ruang” untuk menampilkan peta-peta maupun dokumen terkait dengan Rencana Tata Ruang (lihat Bagian II dari dokumen ini), atau pilih “Rencana Aksi” untuk menampilkan atau menyunting data-data terkait dengan rencana aksi di wilayah perbatasan (lihat Bagian III dari dokumen ini).

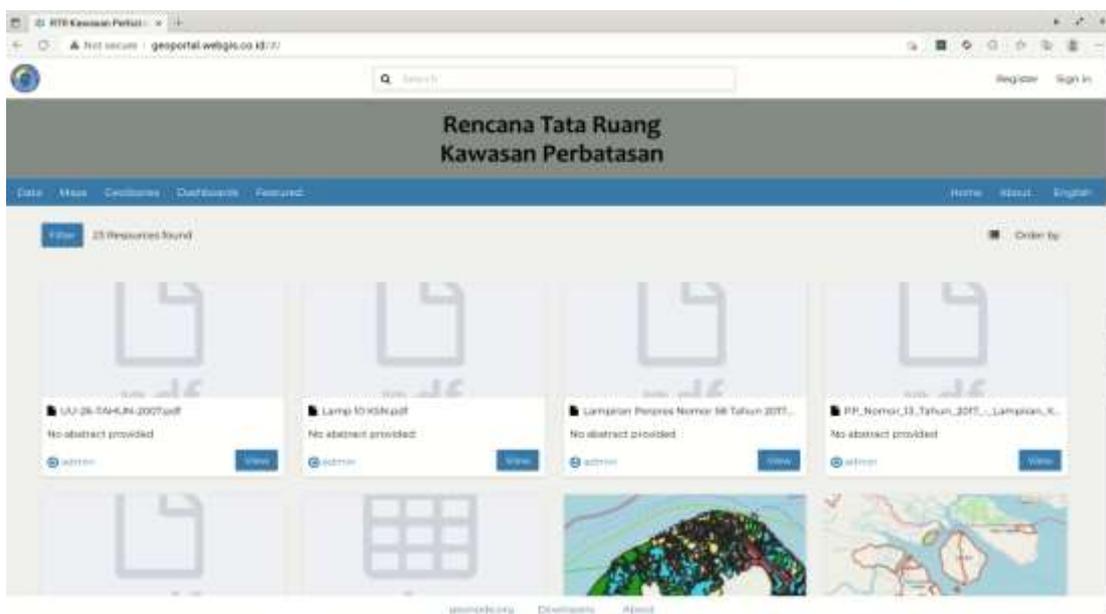
## Bagian II: Pengelolaan Data Spasial & Dokumen

Beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan pengelolaan data spasial dan dokumen, antara lain:

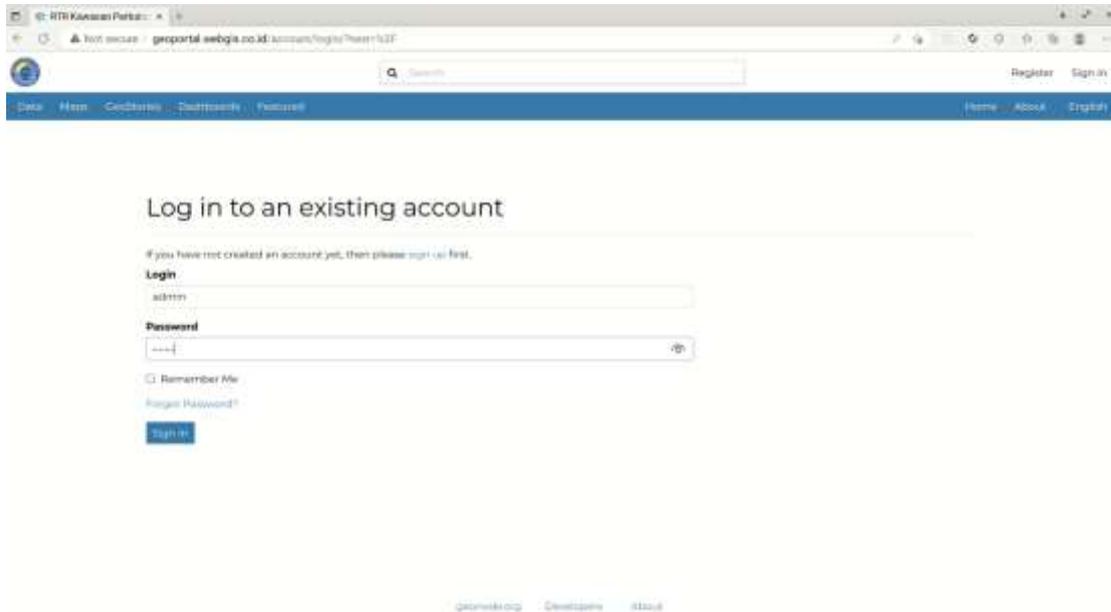
- Login ke aplikasi
- Penambahan layer peta (pola ruang, struktur ruang, infrastruktur, batas hutan dan sebagainya)
- Pembentukan peta yang terdiri dari susunan layer-layer
- Penambahan dokumen yang dapat diakses pihak-pihak yang berkepentingan
- Perubahan metadata terkait data yang kita tambahkan, baik spasial maupun dokumen
- Melihat konten layer, peta maupun dokumen dari front-end

### 2.1 Login ke Aplikasi

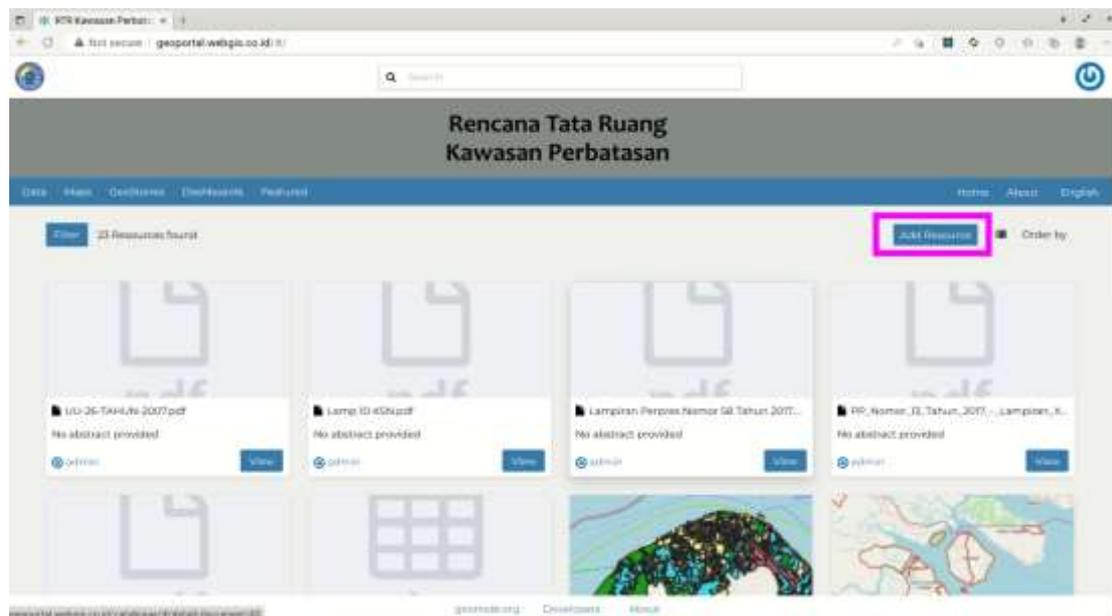
Lokasi backend untuk pengelolaan data spasial dan dokumen bisa diakses pada URL <http://geoportal.webgis.co.id>. Pada tampilan awal aplikasi, jika kita tidak melakukan login, akan terlihat beberapa dataset (layer/peta/dokumen) yang dishare ke publik, seperti pada tampilan berikut:



Tanpa login, kita hanya bisa melihat data yang dishare publik, tanpa bisa menambahkan/mengubah data. Untuk login ke aplikasi, klik “Sign In” di kanan atas, dan masukkan user & password pada tampilan berikut:

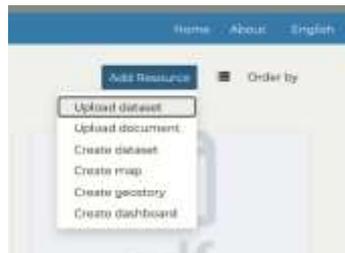


Setelah berhasil login, akan ada tambahan tombol “Add Resources” seperti berikut:

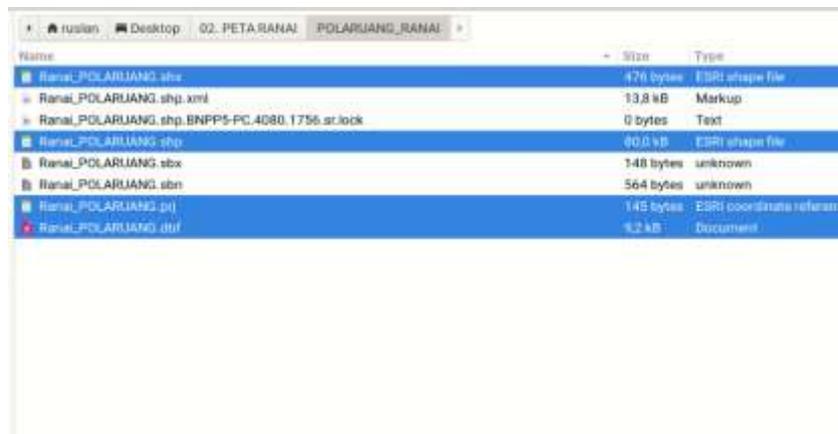


## 2.2 Penambahan Layer Peta

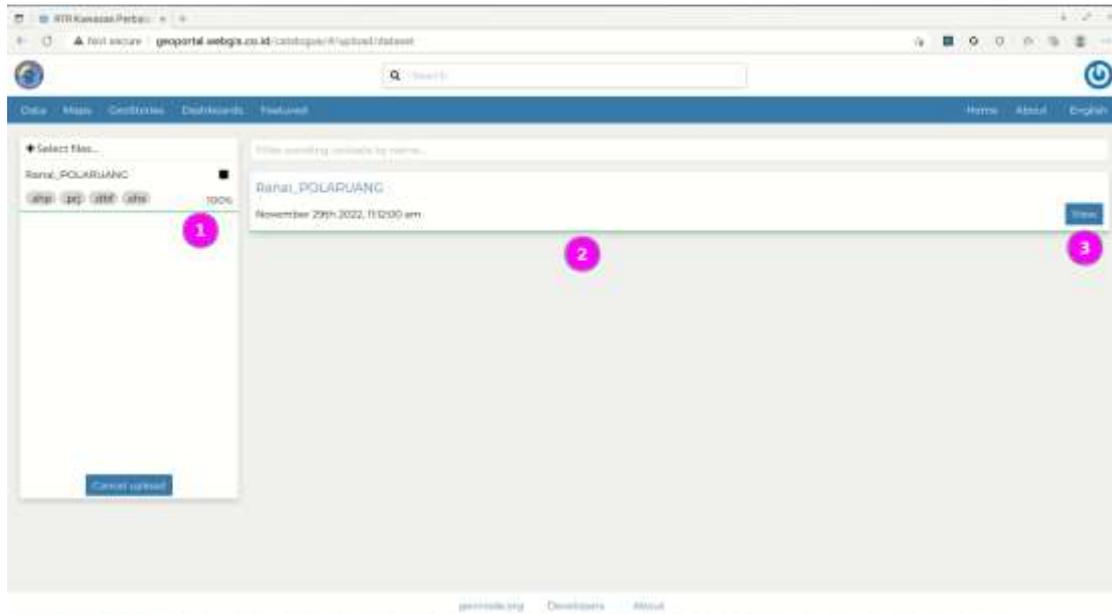
Untuk menambahkan layer peta, klik tombol “Add Resources”, kemudian pilih “Upload Dataset”



Browse ke folder tempat data spasial berada. Dalam contoh ini, data yang diambil dalam format SHP.



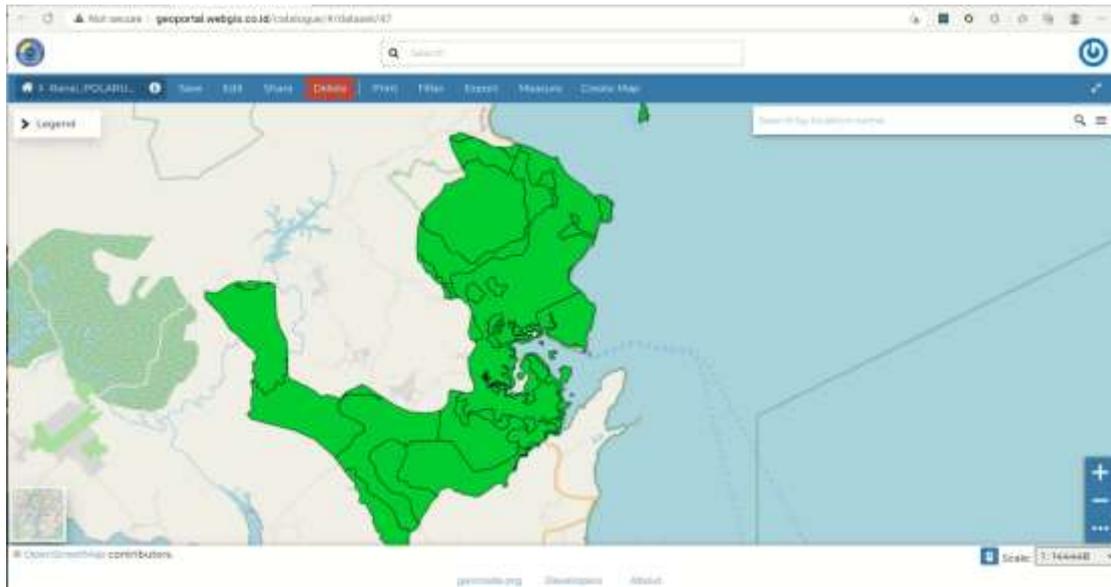
Untuk data dalam format SHP, kita pilih 4 file dengan extension: SHP, SHX, DBF, dan PRJ. Setelah kita memilih keempat file tadi, aplikasi akan mengunggah file-file tersebut, kemudian melakukan pemrosesan, seperti pada tampilan berikut:



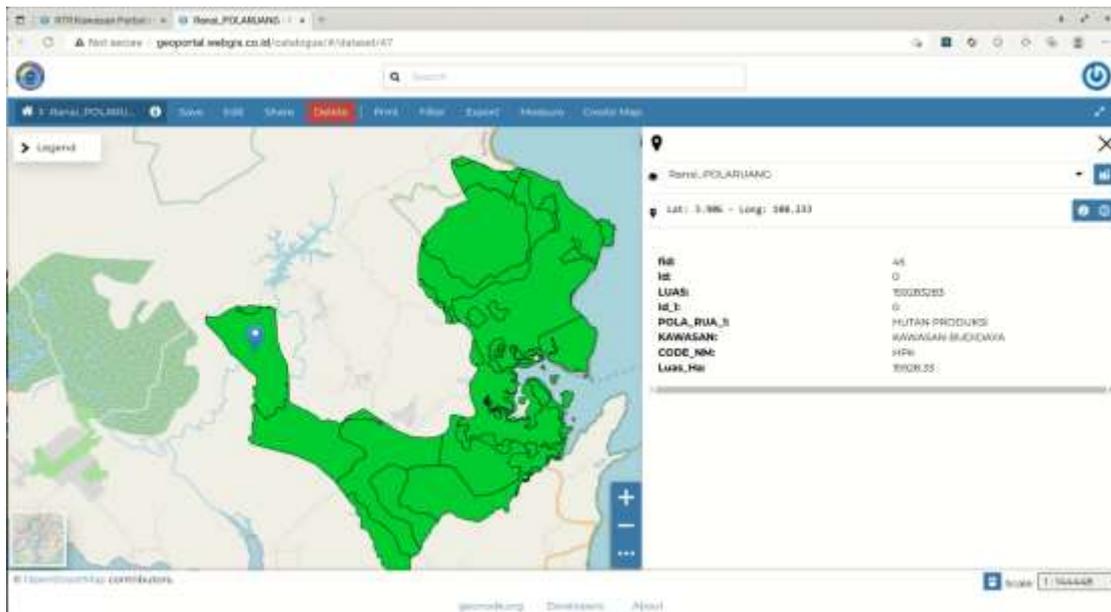
Tahapannya adalah:

- (1) Upload data
- (2) Proses data
- (3) View data (setelah tahap 1 dan 2 selesai)

Setelah proses ini selesai, kita bisa lihat peta yang barusan diunggah, dengan klik tombol “View” (3), sehingga tampil sebagai berikut:

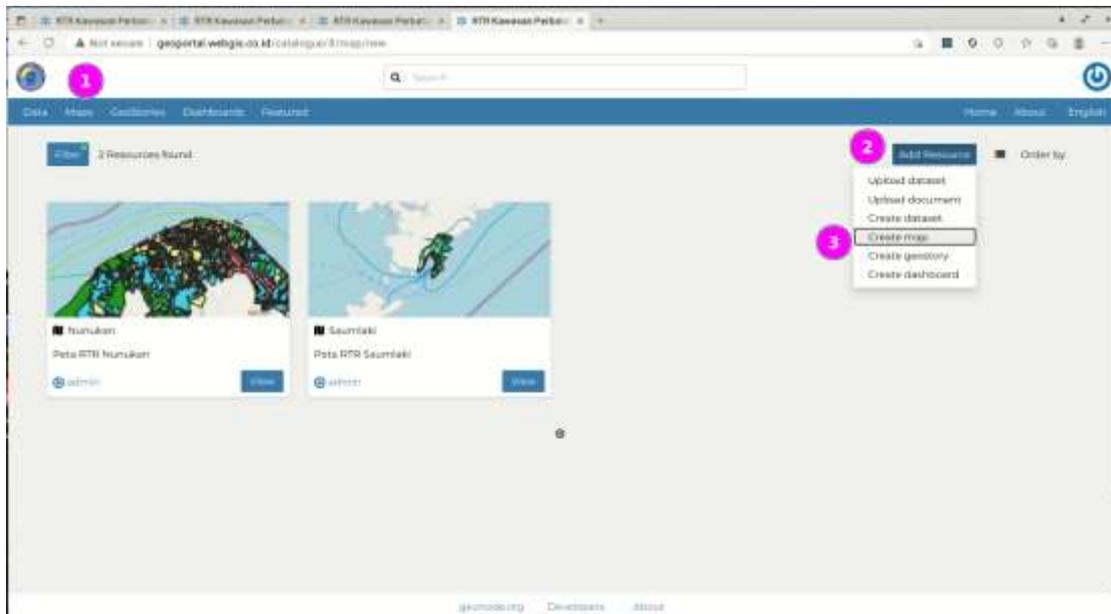


Kita bisa lihat informasi objek peta dengan klik menggunakan mouse pada area yang diinginkan, kemudian informasi objek peta akan tampil di bagian kanan layar, seperti berikut:



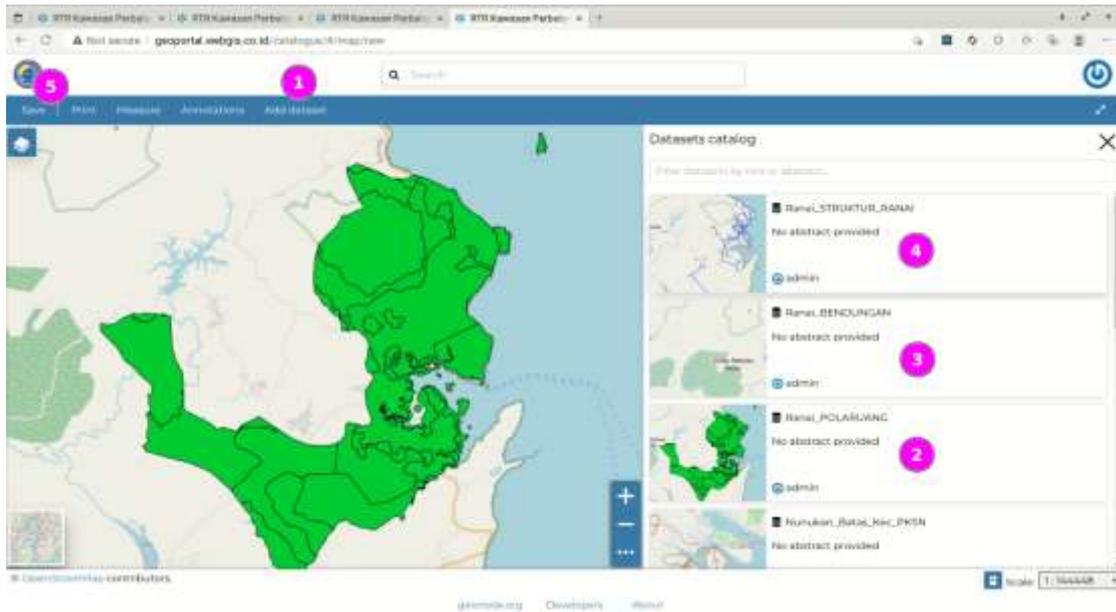
## 2.3 Penambahan Layer Peta

Peta merupakan sekumpulan layer. Dalam aplikasi ini, pembuatan peta bisa dilakukan melalui menu “Maps”, lalu “Add Resource”, dan pilih “Create map”, seperti tampilan berikut:

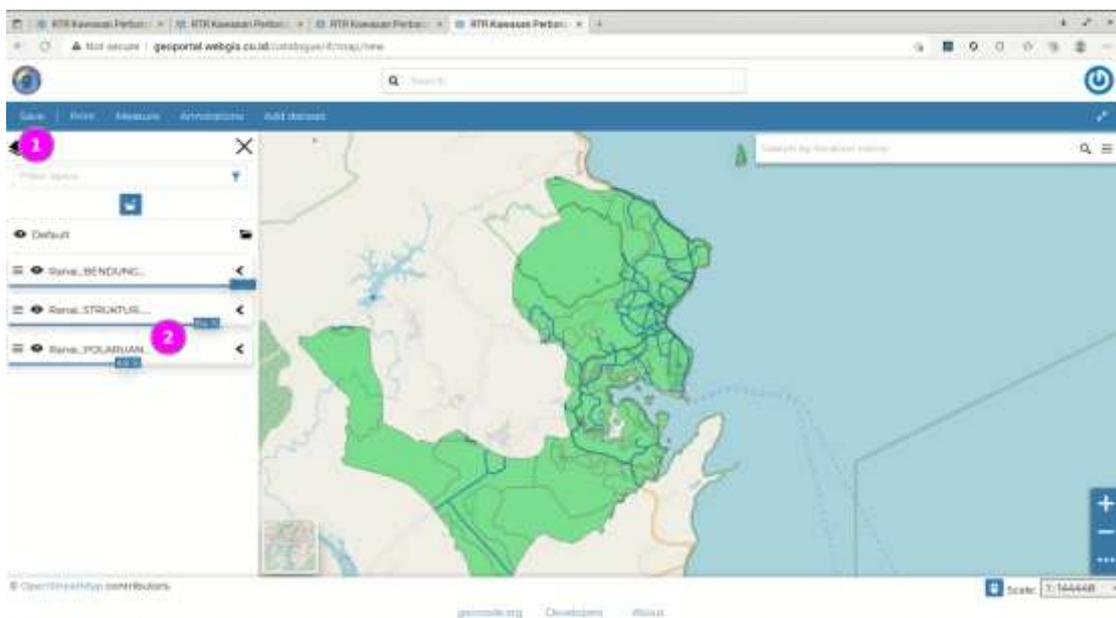


Pada tampilan pembuatan peta seperti pada gambar di bawah ini, lakukan langkah berikut:

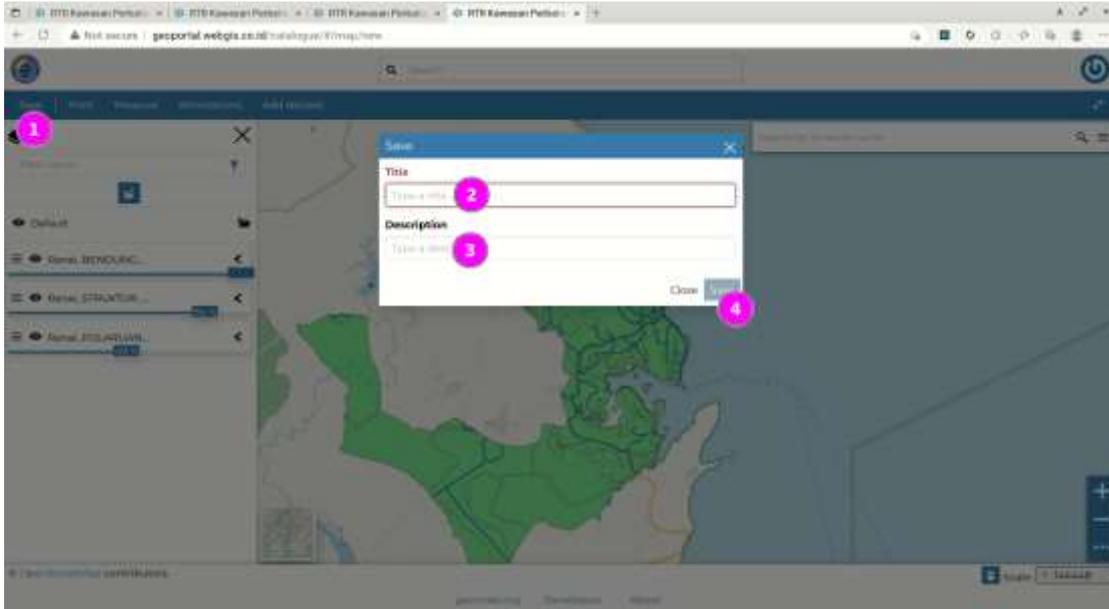
- (1) Pilih “Add dataset” untuk menambahkan layer, yang daftarnya akan tampil di sebelah kanan (langkah 1 di gambar)
- (2) Klik pada semua layer yang ingin ditambahkan ke peta (langkah 2, 3, 4 di gambar)
- (3) Klik tombol “Save” untuk menyimpan data peta yang sudah dibuat (langkah 5 pada gambar)



Kita juga dapat mengatur transparansi layer menggunakan tombol “Layers” (langkah 1 pada gambar di bawah), kemudian geser pengatur transparansi (langkah 2 pada gambar di bawah):

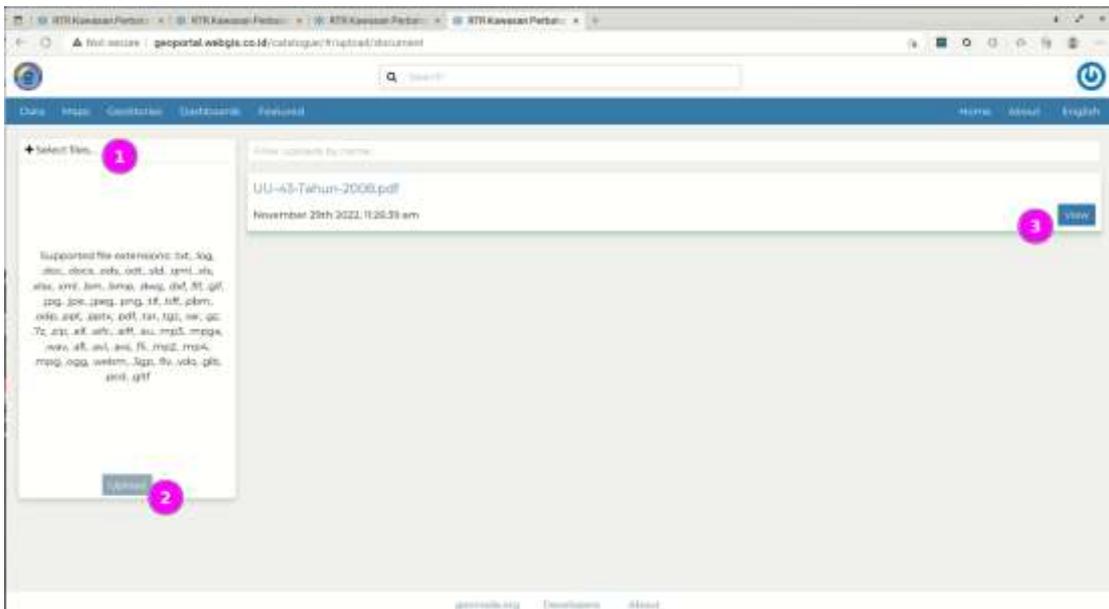


Selanjutnya, simpan peta yang baru kita buat dengan menekan menu “Save”. Isikan nama deskripsi peta seperti pada gambar berikut:

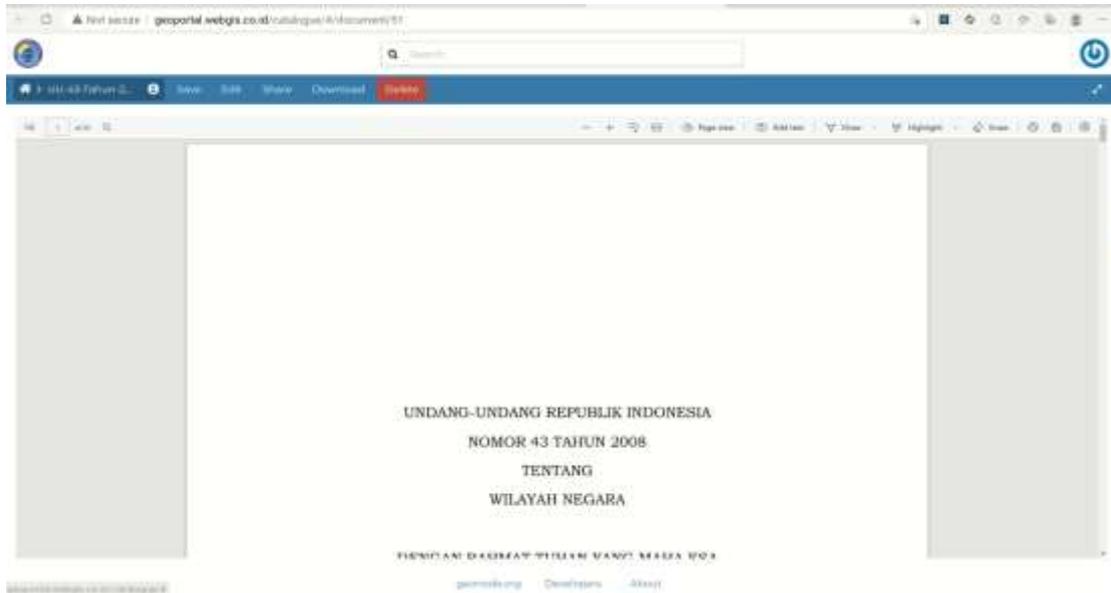


## 2.4 Penambahan Dokumen

Proses penambahan data dilakukan melalui menu “Add Resource”, kemudian pilih “Upload Document”. Pada tampilan unggahan dokumen, pilih “Select files”, kemudian pilih file yang akan diunggah, seperti tampilan berikut:

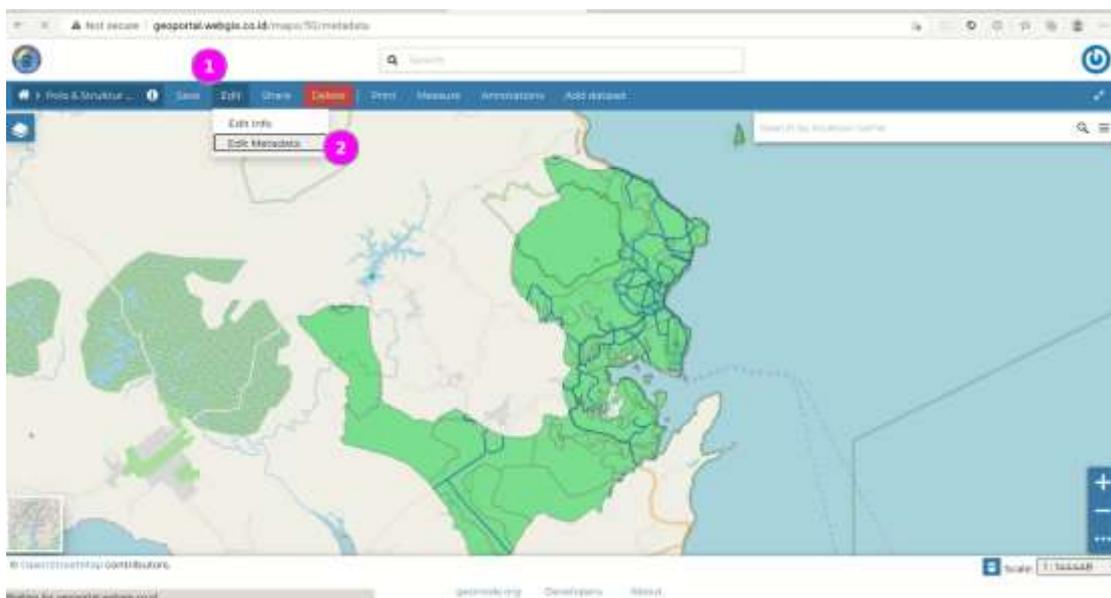


Dokumen yang sudah diunggah, dapat dilihat dengan klik tombol “View”, kemudian akan tampil viewer dokumen seperti di bawah ini:

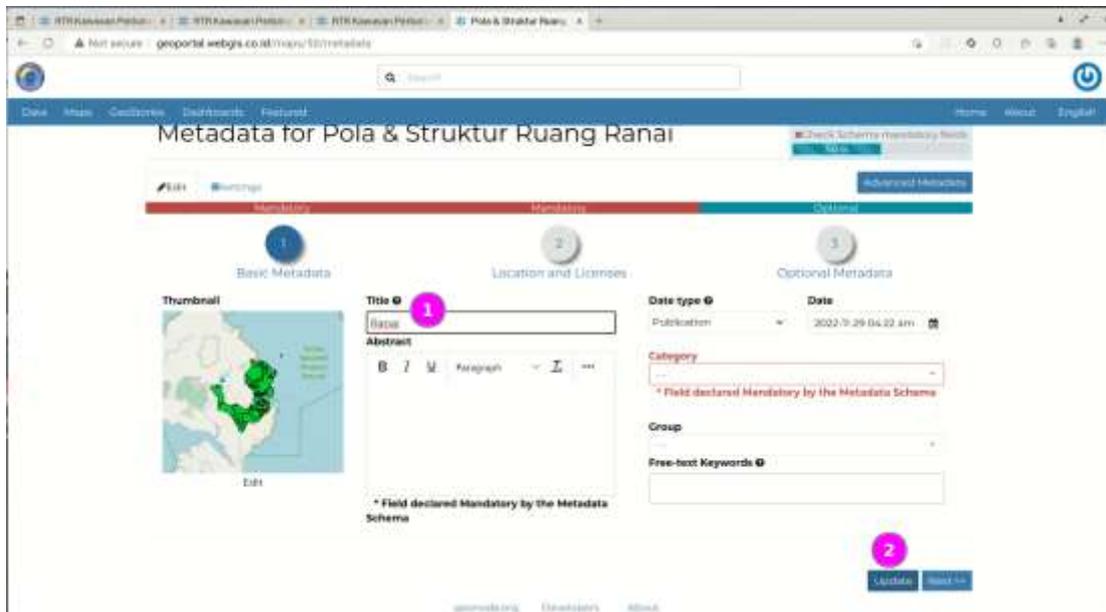


## 2.5 Mengubah Metadata

Untuk mengubah metadata mengenai dataset yang sudah kita unggah, pilih menu “Edit”, kemudian “Edit Metadata”, seperti pada tampilan berikut:

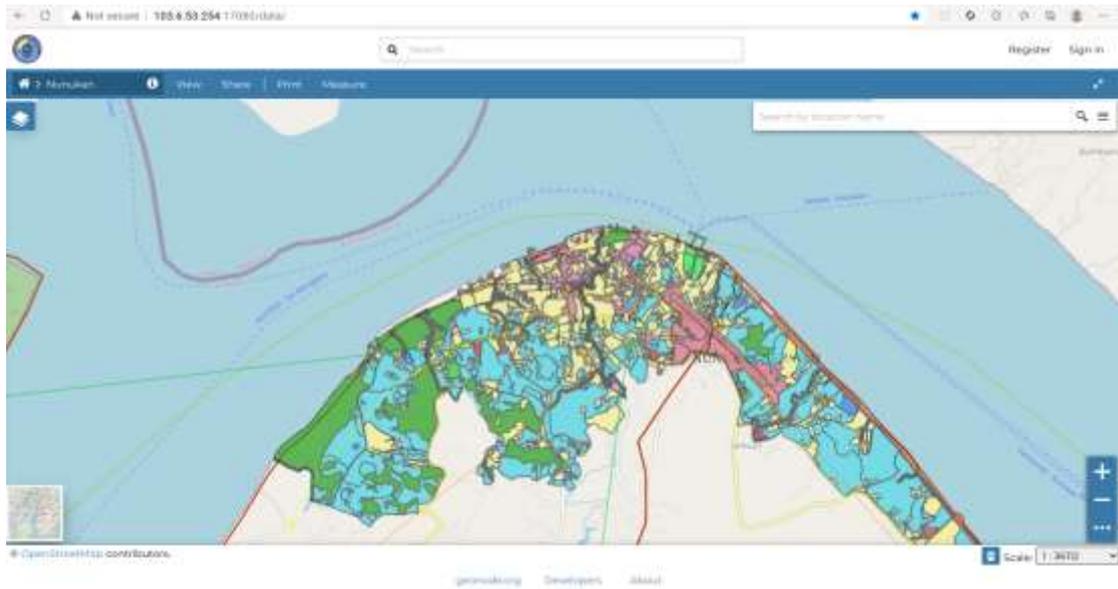


Selanjutnya akan tampil isian metadata. Kita bisa ubah metadata yang dibutuhkan, kemudian klik tombol “Update” untuk menyimpan data, seperti tampilan berikut:



## 2.6 Melihat Data Dari Website SI-PRKP Tanpa Login

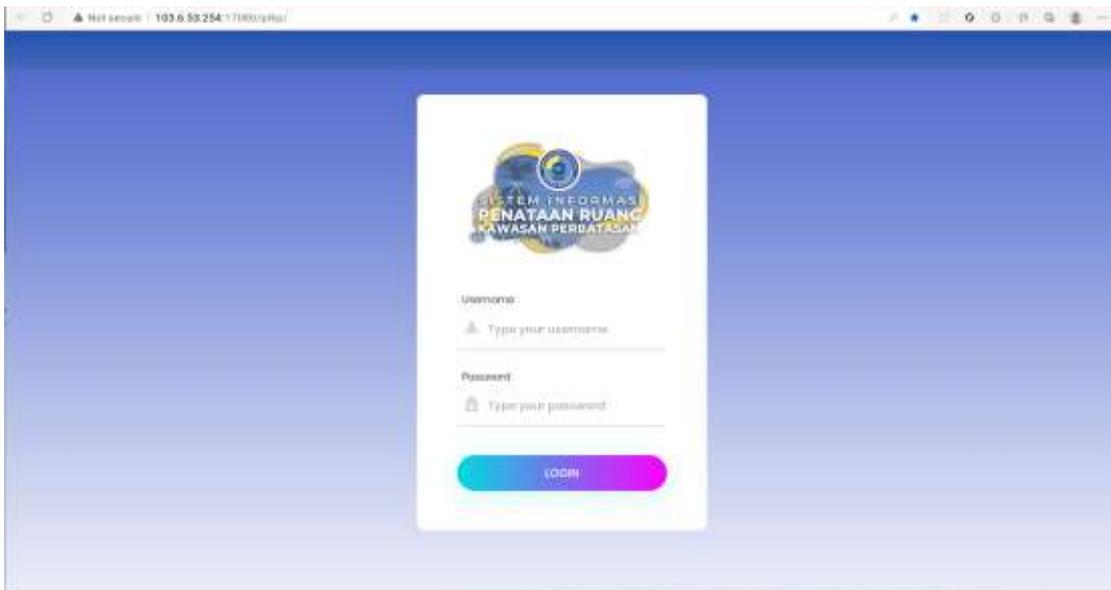
Tanpa melakukan login, data-data dapat dilihat melalui URL <http://103.6.53.254:17080/data>, meupun dengan mengikuti tautan “Peta Rencana Tata Ruang” dari landing page (lihat Bagian I). Tampilannya mirip dengan tampilan ketika login, tetapi tanpa kemampuan editing/penambahan data, seperti pada gambar di bawah ini:



Perhatikan bahwa tidak ada tombol “Edit” maupun “Delete” pada tampilan ini.

### Bagian III: Pencatatan Rencana Aksi

Aplikasi untuk Pencatatan Rencana Aksi, dapat diakses pada URL: <http://103.6.53.254:17080/prkp>, atau dengan mengikuti tautan “Rencana Aksi” dari landing page. Tampilan awal aplikasi ini adalah tampilan login, karena untuk akses aplikasi ini kita diminta untuk mengisi nama dan password. Tampilan login aplikasi seperti gambar di bawah ini:



Setelah berhasil login, kita akan masuk ke tampilan awal aplikasi yang menampilkan daftar kegiatan dalam rangka implementasi rencana aksi, seperti pada gambar di bawah ini:

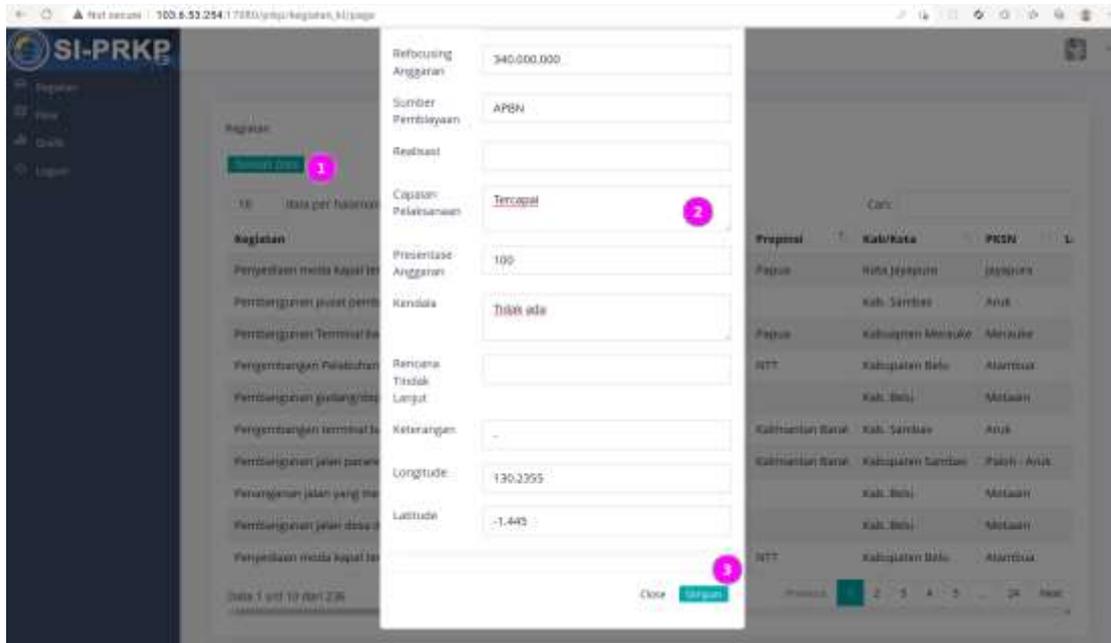
Kegiatan	Provinsi	Kab/Kota	PKSN
Penyediaan moda kapal ternak	Papua	Kec. Jayapura	Jayapura
Pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada		Kab. Sambas	Anuk
Pembangunan Terminal barang penumpang PLBN	Papua	Kabupaten Merauke	Merauke
Pengembangan Pelabuhan & Bandar Utara	NTT	Kabupaten Belu	Atambua
Pembangunan gudang/depono-SRG		Kab. Betu	Mosaan
Pengembangan terminal barang dan penumpang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Anuk	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	Anuk
Pembangunan jalan perantara perbatasan	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	Paloh - Anuk
Peningkatan jalan yang menghubungkan Atapupu - Dekasi (RDTL)		Kab. Betu	Mosaan
Pembangunan jalan desa di Desa Siliawan, Kecamatan Tarifeso Timur		Kab. Betu	Mosaan
Penyediaan moda kapal ternak	NTT	Kabupaten Belu	Atambua

Selanjutnya dari halaman awal, kita bisa melakukan beberapa hal berikut:

- Menambahkan data kegiatan baru
- Mengubah data kegiatan lama
- Melihat sebaran data lokasi kegiatan, dari hasil pengisian koordinat
- Melihat grafik summary rencana kegiatan

### 3.1 Menambahkan Data Kegiatan Baru

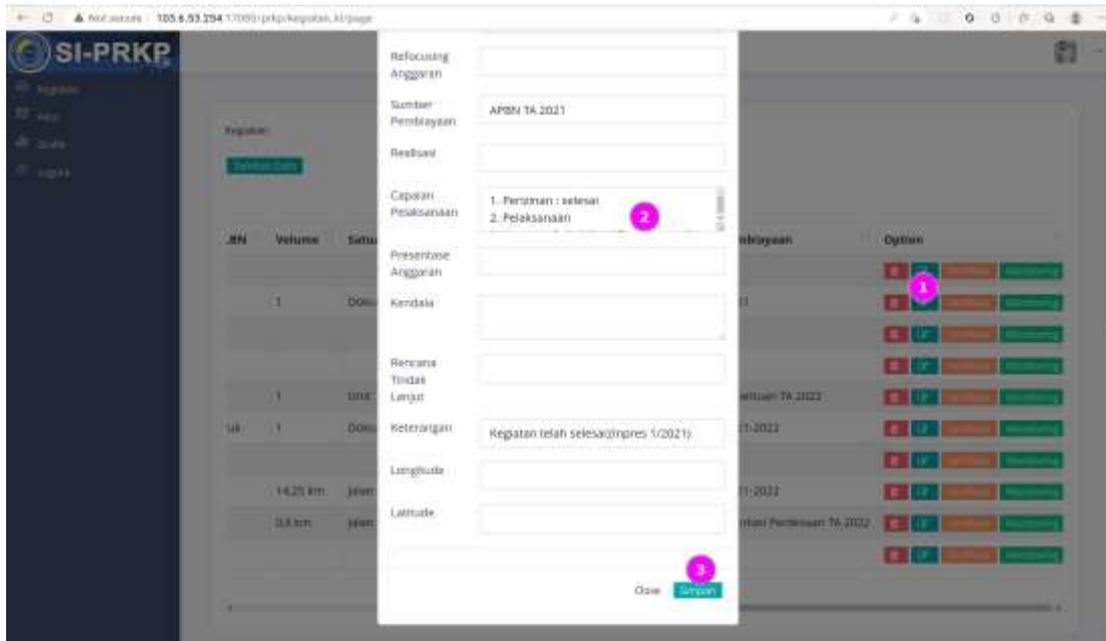
Proses penambahan data kegiatan baru, dilakukan dengan klik tombol “Tambah Data”, kemudian isikan data kegiatan, dan klik tombol “Simpan”.



Setelah klik tombol “Simpan”, maka data baru yang diisikan akan tampil di daftar kegiatan.

### 3.2 Mengubah Data Kegiatan Lama

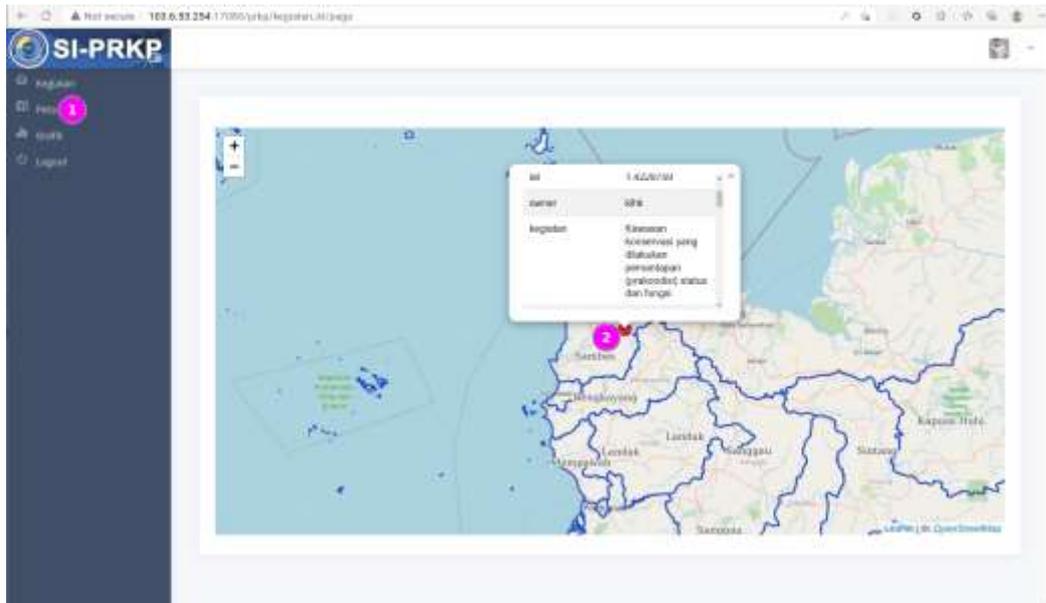
Untuk mengubah data kegiatan yang sudah ada, klik tombol “Edit Data” pada baris data yang ingin diubah (lihat langkah 1 di gambar bawah), kemudian ubah data (langkah 2) dan Simpan (langkah 3):



Setelah klik tombol Simpan, maka hasil perubahan data akan segera tampil di daftar kegiatan.

### 3.3 Melihat Peta Sebaran Data Lokasi Kegiatan

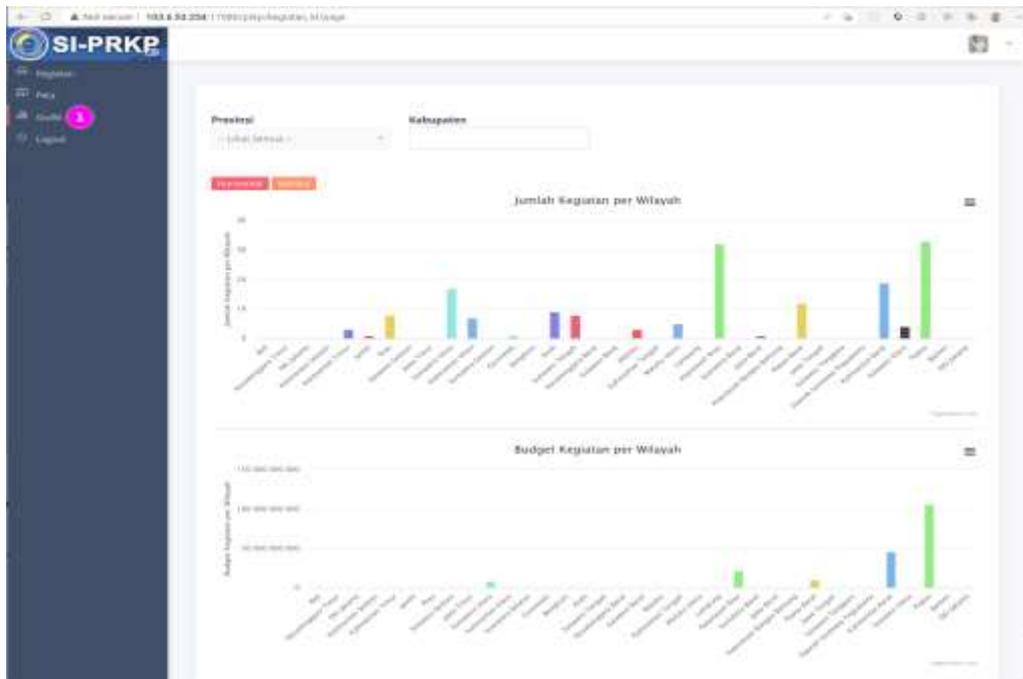
Kita dapat mengisikan koordinat (lintang/bujur atau latitude/longitude) ketika membuat data baru atau mengubah data kegiatan. Berdasar isian data koordinat ini, kita bisa lihat sebaran lokasi kegiatan dengan memilih menu “Peta”, seperti terlihat pada gambar berikut:



Pada tampilan peta, kita bisa klik lokasi kegiatan untuk menampilkan informasi kegiatan tersebut (langkah 2 pada gambar di atas).

### 3.4 Melihat Grafik Summary Rencana Kegiatan

Kita dapat melihat summary jumlah maupun anggaran kegiatan, dari menu "Grafik", seperti pada tampilan berikut:



Selain tampilan secara nasional seperti di atas, kita bisa filter misalnya hanya untuk provinsi tertentu, dengan cara memilih provinsi yang diinginkan dari pilihan provinsi (langkah 2 pada gambar di bawah):

